



EDISI JULI-SEPTEMBER 2025

GAUNG **AMAN**

Media Informasi & Komunikasi Masyarakat Adat

Menjaga Jurung dan Huma
Memastikan Kedaulatan Pangan

Takkan Mati
Terbakar Api
Ladang Berpindah,
Kebakaran Hutan
& Kriminalisasi

**SEMESTA
PENGETAHUAN
MASYARAKAT ADAT**

**JALAN ADIL
— HADAPI —
KRISIS IKLIM**





Susunan Redaksi

Penanggung Jawab

Sekretaris Jenderal AMAN
Rukka Sombolinggi

Pimpinan Umum

Deputi I Sekjen AMAN
Urusan Organisasi
Eustobio R. Renggi

Pemimpin Redaksi

Direktur Infokom PB AMAN
Titi Pangestu

Redaktur Pelaksana

Wulan Putri

Kepala Newsroom AMAN

Apriyadi Gunawan

Redaktur Bahasa

Muamar Fikrie

Desain & Tata Letak

Taqi

Koordinator Foto

Giat Perwangsa

Kontributor

Thata Debora Agnessia, JMA Kalteng; AS Rosyid, Pengajar Pesantren Alam Sayang Ibu, Lombok Barat; Bima Satria Putra, JMA Kalteng; Belarmino M. Lapong, Anggota BPAN Minahasa, Sulut; Joanny F. M. Pesulima, JMA Maluku; Hairuddin Alexander, JMA Kaltim; Simon Welano, JMA NTT; Sri T. Shuket, Anggota PHD Perempuan AMAN Sekatak, Kaltara.

Distribusi

Jeki Angkat & Awaluddin (Dir. OKK)

Alamat Redaksi

Rumah AMAN
Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11A
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12820

(021) 829 7954/837 06282

rumahaman@aman.or.id

Media Sosial

@AliansiMasyarakatAdatNusantara

@RumahAMAN

@rumah.aman

AMAN - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara -

Podcast Radio Gaung AMAN

www.radio.aman.or.id

"Radio Gaung AMAN"

Portal Berita AMAN.or.id

AMAN.or.id

04

Semesta Pengetahuan Masyarakat Adat: Jalan Adil Hadapi Krisis Iklim



Menjaga Jurung dan Huma Memastikan Kedaulatan Pangan

07



14

Pemerintahan Adat: Tantangan, Mitos, & Kedaulatan



20

Takkan Mati Terbakar Api Ladang Berpindah, Kebakaran Hutan & Kriminalisasi





Leuit, Tabungan Pangan untuk Keberlanjutan



Masyarakat Adat Internasional Apresiasi Perayaan HIMAS 2025 di Kasepuhan Guradog Banten



Masyarakat Adat Langagedha di Flores Masih Menjaga Tradisi Leluhur



Mawale: Menyemai Kopi, Menyemai Identitas



Adu Inum, Perempuan yang Meramu & Merawat Kehidupan



Konsolidasi Perempuan Pemimpin Masyarakat Adat Nusantara: Mercusuar Peradaban & Penjaga Kehidupan



SEMESTA PENGETAHUAN MASYARAKAT ADAT
JALAN ADIL HADAPI KRISIS IKLIM



Semesta Pengetahuan Masyarakat Adat: Jalan Adil Hadapi Krisis Iklim

Oleh: Rukka Sombolinggi,
Sekretaris Jenderal AMAN.

Jejak kolonialisme itu nyata, meski wujudnya berganti rupa. Dahulu ia hadir dengan kapal perang, senapan, dan penaklukan; kini datang lewat kontrak investasi, skema pasar karbon, dan klaim atas 'energi hijau'. Dulu motifnya rempah; kini berganti nikel, lithium, dan hutan tropis yang dianggap 'cadangan karbon global'. Polanya sama: perampasan tanah, degradasi ekosistem, dan peminggiran Masyarakat Adat.

Sejak era kolonial, tanah leluhur diperlakukan semata-mata sebagai gudang mineral, sumber eksploitasi yang bisa ditakar dalam angka-angka untuk keuntungan segelintir orang. Pengetahuan Masyarakat Adat, yang menjaga keseimbangan manusia dan alam selama ribuan tahun, justru diberi cap 'primitif'. Padahal bukti ilmiah menunjukkan hal sebaliknya. Laporan IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) dan IPBES (*Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*) turut menegaskan bahwa sekitar 80 persen ekosistem terbaik di dunia saat ini berada di wilayah adat. Keberhasilan itu lahir dari sistem pengetahuan yang diwariskan turun-temurun, hasil dari interaksi panjang antara manusia dengan alam.



Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi, menanam bibit pohon, di kebun kolektif Masyarakat Adat Kasepuhan Guradog, pada peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, di Kasepuhan Guradog, Lebak, Banten.

Sumber Foto :
Dokumentasi AMAN.



Namun, pengakuan dunia itu tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Wilayah adat terus menyusut, digerus tambang nikel, perkebunan monokultur, *geothermal*, bendungan, dan berbagai proyek infrastruktur lain. Pengetahuan Masyarakat Adat pun terus dieksploitasi dan diappropriasi: ramuan obat tradisional diadaptasi dan diklaim sebagai formula paten; teknik pengelolaan hutan dipasarkan sebagai 'inovasi hijau', tetapi dimensi sosial, spiritual, dan nilai kolektifnya dikesampingkan dan dipreteli. Pengetahuan Masyarakat Adat kerap diperlakukan sebagai komoditas bebas pakai—diakses tanpa izin, tanpa pengakuan, tanpa pemajuan, dan tanpa mekanisme pembagian manfaat yang adil.

Krisis iklim memperparah tekanan itu. Suhu global meningkat, pola musim kacau dan makin sulit diprediksi; bencana ekologis yang disebabkan manusia terjadi lebih sering dan lebih dahsyat. Namun, solusi yang ditawarkan negara justru menambah persoalan. Dengan slogan "transisi energi bersih", hutan tropis dirusak untuk tambang litium, nikel, dan pembangunan bendungan. Solusi teknokratik semacam ini hanya mengulang pola perusakan ekologis—dan lagi-lagi, Masyarakat Adat yang menanggung akibatnya: kehilangan tanah, sumber penghidupan, dan ruang hidup. Krisis iklim tidak boleh dipahami semata sebagai persoalan teknis semata, melainkan sebagai krisis relasi antara manusia dan alam. Dalam konteks inilah, pengetahuan Masyarakat Adat hadir sebagai jawaban yang paling konkret.

Pengetahuan Masyarakat Adat telah terbukti relevan melalui seperangkat pedoman yang mengatur tata kelola lingkungan: kapan ladang boleh dibuka, bagaimana hutan dibagi ke dalam zona sakral maupun zona produksi, serta bagaimana sungai dikelola agar pemanfaatan air tetap adil. Seluruh praktik tersebut merupakan bentuk ilmu pengetahuan berbasis pengalaman panjang dan observasi lintas generasi, jauh melampaui anggapan bahwa pengetahuan Masyarakat Adat hanyalah "tradisi kuno".

Abah mengajarkan penggunaan Kalender bercocok tanam pada peserta didik Sekolah Adat Dangi, Batuwangi, Garut, Jawa Barat.

*Sumber Foto :
Dokumentasi AMAN.*





Sementara itu, negara terus terjebak pada logika proyek. Restorasi dilakukan seragam, reboisasi mengutamakan jenis tanaman cepat tumbuh, dan konservasi malah mengeksklusi: Masyarakat Adat disingkirkan dari tanah yang telah dijaga berabad-abad. Hasilnya: ekosistem rapuh dan konflik sosial terus berulang.

Wilayah adat bukanlah ruang kosong, bukan terra nullius, sebagaimana yang dipercaya para penjajah Eropa dahulu. Ia adalah ruang hidup, ekonomi, budaya, spiritual, dan politik yang eksis jauh sebelum negara-bangsa terbentuk. Mengakui hak Masyarakat Adat bukan sekadar pilihan kebijakan afirmatif atau kemurahan hati, melainkan kewajiban konstitusional sekaligus strategi paling efektif untuk mitigasi dan adaptasi krisis iklim. Jika dunia serius menghadapi krisis iklim, pengetahuan Masyarakat Adat harus ditempatkan sebagai rujukan utama. *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) wajib ditegakkan. Pengetahuan Masyarakat Adat harus diakui sebagai hak kolektif yang melekat pada Masyarakat Adat. Karena itu, kontrol penuh atas riset, data dan pemanfaatannya harus berada di tangan kita sendiri.

Berbagai inisiatif nyata sudah berjalan. Sekolah-sekolah adat yang kita gagas terus mengajarkan pengetahuan dan cara merawat alam kepada generasi muda. Perempuan adat mengambil peran kepemimpinan dalam tata kelola sumber daya. Aturan adat terus menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan konservasi. Semua itu terbukti menjaga keberlanjutan ekosistem sekaligus memperkuat identitas kolektif dan kapasitas kita, Masyarakat Adat.

Mengakui dan menghormati Masyarakat Adat berarti mengakui wilayah adat, sumber daya, termasuk pengetahuannya, sebagai fondasi keberlanjutan. Tidak adanya pengakuan terhadap Masyarakat Adat sama artinya dengan menolak solusi iklim yang paling adil dan efektif. Transisi energi yang mengabaikan Masyarakat Adat akan selalu paradoksal dan destruktif.

Keadilan iklim tidak mungkin tercapai tanpa keadilan bagi Masyarakat Adat. Dunia perlu keberanian untuk belajar dari Masyarakat Adat demi menjaga bumi tetap hidup.

Pengetahuan kita adalah jawabannya!



Peserta didik Sekolah Adat belajar beberapa jenis rimpang yang berkhasiat obat dalam Tradisi & Pengetahuan Masyarakat Adat Dangi, Batuwangi, Garut, Jawa Barat.

Sumber Foto :
Dokumentasi
AMAN.



Menjaga Jurung dan Huma Memastikan Kedaulatan Pangan

Oleh: **Thata Debora Agnessia**,
Jurnalis Masyarakat Adat
dari Pangkalan Bun,
Kalimantan Tengah



*Seorang ibu mencari sayur di kebun.
Sumber Foto : SELASTEN.*

Berladang bagi Masyarakat Adat Dayak memiliki sebutan yang beragam sesuai dengan kekayaan bahasa dan tradisinya. Bagi Masyarakat Adat Dayak di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, kegiatan ini dikenal dengan istilah *bahuma*, sebuah sistem pertanian berpindah yang memanfaatkan lahan kering. Dalam praktiknya, tanah yang hendak diolah dibuka dengan cara dibakar, sebuah wujud adaptasi Masyarakat Adat Dayak atas lanskap geografis wilayah adat yang dihuni.

Tidak seperti pulau Jawa yang tanahnya dianugerahi campuran abu vulkanik, di Kalimantan kondisinya berbeda. Bumi tanpa gunung berapi ini tidak memiliki tanah vulkanik yang kaya akan unsur hara. Sebagai gantinya, Masyarakat Adat Dayak menemukan caranya sendiri untuk menyuburkan tanah. Di sinilah api memainkan peran penting. Abu dan arang hasil pembakaran lahan menjadi pupuk alami yang menyuburkan lahan kering.

Bagi Masyarakat Adat Dayak, api tidak dimaknai sebagai perusak, melainkan bagian dari denyut kehidupan—api untuk membersihkan lahan, menciptakan kesuburan tanah, bahkan mengendalikan hama. Sebidang tanah hanya dibuka dan digunakan untuk periode waktu tertentu, untuk kemudian ditinggal, dibiarkan pulih kembali secara alami. Dengan begitu, Masyarakat Adat Dayak akan berpindah membuka lahan baru untuk ladang berikutnya.



Di berbagai penjuru Kalimantan, pengetahuan ini diwariskan secara turun-temurun. Salah satu jejaknya dapat kita temui pada Masyarakat Adat Dayak Arut di Desa Panahan, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Di sini, denyut kehidupan berladang itu masih berdegup meskipun kian melemah. Di balik meluasnya kebun sawit dan komodifikasi beras, ladang-ladang *huma* kian jarang. Masih tersisa beberapa keluarga yang setia pada cara leluhur dalam berladang. Tidak hanya membuka lahan dengan api, keluarga-keluarga ini juga merawat pengetahuan yang diwariskan leluhur dengan membaca tanda-tanda alam untuk menanam dan menyimpan hasil panen di *jurung*, atau lumbung kayu yang bisa menjaga padi hingga bertahun-tahun.

Lonen, Wakil Ketua Adat Panahan, mengakui dirinya sudah tidak lagi berladang. Sehari-hari ia lebih banyak mengurus kebun sawit seluas dua hektare. Meski demikian, sebagai tetua adat, ia tetap menjadi penjaga ingatan. Ia menyimpan cerita-cerita panjang tentang *huma*, tentang ritual, doa, dan tata cara yang dulu mengikat Masyarakat Adat Dayak Arut dengan tanah dan padinya.

Bagi Masyarakat Adat Dayak Arut, berladang tidak hanya menanam padi. Dari tanah kering itu tumbuh singkong, terong, cabai, hingga *uca* (bawang merah lokal). "Tiap-tiap perladangan itu pasti ada juga sayur-sayuran, *gimul*, dan tanaman lain," jelas Lonen. Sistem ini bersifat polikultur, artinya berbagai jenis padi ditanam bersamaan—padi merah, *geragai*, *pulut besar*, *pulut kecil*, *pulut hitam*, *pulut merah*, dan *pulut putih*. "Perempuan memegang peranan penting, mulai dari mengatur urutan *menugal* (proses berladang) hingga menentukan bibit mana yang ditanam, biasanya dimulai dari bibit paling besar hingga terkecil. Oleh karenanya, perempuanlah yang biasanya paling paham jenis dan nama padi," tambahnya.



Deforestasi demi kebun sawit

Lokasi Arut Utara,
Kab. Kotawaringin Barat,
Kalimantan Tengah.
Sumber Gambar:
Dokumentasi Citra
Google Earth,
Desember 2014.



Dalam membuka ladang, Masyarakat Adat Dayak Arut mempunyai tahapan tertentu. Tanah diuji terlebih dahulu dengan menancapkan parang—jika lengket berarti subur, dan jika berpasir artinya tidak layak. Kayu semak ditebas (*nebas*), kayu sedang ditebang (*nerang*), dan kayu besar dijatuhkan (*ampe oba*). Ini tahap terakhir yang artinya lahan siap dibakar. Namun, semua dibiarkan kering sebelum dibakar. Setelah itu, penting untuk membaca tanda alam. Peladang biasanya menyiapkan tempat duduk untuk batu asah. Kayu disusun lima atau tujuh batang, tidak boleh genap, sebagai alas untuk menaruh batu asah. "Kita duduk di situ, parang diasah di atas kayu. Setelah itu batu asah ditinggal, kita pulang. Besoknya kalau batu asah itu hilang atau pindah sendiri, artinya angker, keramat. Tidak boleh lagi berladang di situ," jelas Lonen.

Dalam kepercayaan Masyarakat Adat Dayak, hal ini menegaskan bahwa pembukaan ladang bukan sekadar kerja fisik, tapi juga bagian dari komunikasi dengan alam dan dunia gaib. Ada tanda-tanda yang harus dihormati, ada pantangan yang jika dilanggar bisa mendatangkan malapetaka. Ada pula ritual seperti *mangkap mentawa* bagi Masyarakat Adat Dayak Arut, di mana pohon *mentawa* dan *kemayau* yang bertetangga dianggap *bertulah* dan dijadikan media untuk meminta panas agar ladang bisa dibakar.

Bagi Masyarakat Adat Dayak, kerja ladang tidak berhenti ketika api padam dan padi mulai tumbuh. Setiap panen, semua orang bertanggung jawab untuk menjaga hasil panen agar tetap tersedia sepanjang tahun. Oleh karena itu, hasil panen tidak langsung dihabiskan. Padi disimpan di *jurung* atau *jelapang*, yang dalam bahasa Indonesia disebut lumbung. Dahulu, *jurung* dibuat dari kulit kayu, karena kulit kayu dianggap rapat dan tahan lama. Ada juga lumbung yang lebih besar, dengan desain yang dibuat untuk mencegah tikus masuk. "Kalau sekarang orang pakai seng, dilapisi di tiangnya. Tikus tidak bisa manjat karena licin. Sama saja fungsinya, hanya modifikasi dari cara lama," jelas Lonen.

Pada masa lalu, membuat *jurung* bukan perkara mudah. Belum ada *chainsaw* (gergaji mesin). Kayu-kayu lebar dipotong dengan kapak atau *belayung*. "Kayu *bandir* itu *diandung* (diolah), *diburdarga* (dibulatkan). Lama sekali prosesnya," kenang Lonen tentang keterampilan leluhur dalam membangun lumbung tanpa alat modern.



Anak-Anak Masih Melestarikan Budaya Babukung.
Sumber Foto : Arsip SELASTEN



Meski bentuk *jurung* kini agak berubah, fungsinya tetap sama, yakni cadangan pangan jangka panjang. Ada pula syarat adat yang menyertai, padi hasil panen pertama tidak boleh langsung dimasukkan ke *jurung*. "Kalau orang tua dulu ada doa-doanya. Biasanya padi merah dulu yang masuk karena dianggap rajanya padi. Sehat," tambahnya.

Jurung bukan sekadar tempat penyimpanan, tapi simbol ketahanan sosial. Saat paceklik, semua keluarga berhak mendapat bagian. Pada tahun 1975 pernah terjadi *lapai* atau kelaparan. Saat itu, kemarau panjang membuat singkong tidak bisa tumbuh, dan ingatan kolektif soal peristiwa ini masih membekas hingga hari ini. "Satu keluarga, tiga kilo seminggu. Dibagi rata, tidak boleh ada yang monopoli," kenangnya.

Empat tahun setelahnya, Desa Panahan kembali diuji. Pada 1979, sebuah wabah muntaber misterius melanda kampung. Orang-orang jatuh sakit, muntah-muntah, diare, tubuh melemah. Dalam hitungan minggu, sepuluh nyawa melayang.

"Orang-orang ketakutan, banyak yang lari karena dianggap penyakit menular," kenang Lonen. Panahan terisolasi, akses darat sulit, jalan setapak hanya bisa ditempuh sehari-hari. Di tengah kepanikan itu, untuk pertama kalinya helikopter pemerintah mendarat di Panahan, membawa obat dan bantuan pangan.

Bagi Masyarakat Adat Dayak Arut, pengalaman pahit itu menjadi pelajaran sangat berharga. *Jurung* atau lumbung padi yang selalu terisi setiap panen dipandang semakin penting. Ia menjadi benteng terakhir cadangan pangan yang bisa menyelamatkan kampung saat krisis, entah karena paceklik, bencana, atau wabah penyakit.

Sama halnya dengan Masyarakat Adat Dayak Arut, Masyarakat Adat Dayak Darat di Tempayung, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, juga menekankan pentingnya menanam ragam tanaman ketika berladang. Padi lokal seperti padi *kerekot*, *betel*, hingga *lokatan* (ketan) ditanam bergilir bersama kacang, labu, pare, dan sayuran lain. Lahan dikelola dengan sistem rotasi dan ladang berpindah, yang setelah usai digunakan kemudian ditinggalkan, dan setelah tiga hingga lima tahun bisa pulih untuk diolah kembali.





Waktu *menugal* tidak pernah ditentukan secara sembarangan. Langit malam menjadi panduan yang mesti dibaca. Gugusan bintang Kartika menjadi penanda musim. Jadi, ketika bintang itu tampak jelas, tandanya tanah sudah siap dibuka dan padi bisa segera ditanam. Fase bulan pun ikut diperhitungkan, sebab bulan terang diyakini membawa hasil yang lebih baik. "Kalau salah waktu, bisa saja padi diserang hama atau hasilnya kurang," kenang Sumiati, seorang Perempuan Adat dari Tempayung.

Hasil panen disimpan di *jurung* dan setiap rumah bisa memiliki satu hingga dua *jurung* yang mampu menyimpan padi hingga tiga tahun. Dari lumbung inilah keluarga memenuhi kebutuhan harian, pesta pernikahan, bahkan ritual adat tanpa harus membeli di pasar. *Jurung* bukan sekadar tempat penyimpanan, tapi juga sebagai simbol gotong royong.

Jika ada keluarga menggelar pesta, kampung biasanya juga menyumbang padi dari lumbungnya. Sistem ini membuat masyarakat tidak bergantung pada pasar. Masyarakat makan dari hasil ladang, menyimpan cadangan di *jurung*, dan saling berbagi dalam ritus adat. Perempuan berperan dalam menjaga bibit, mengatur simpanan padi, hingga memasak di ladang.

Bagi Masyarakat Adat Dayak, berladang tidak hanya dimaknai sebagai soal produksi pangan semata, melainkan fondasi kedaulatan—kemampuan untuk makan dari tanah sendiri, menyimpan hasil panen di *jurung*, dan mengatur pembagian pangan tanpa harus bergantung pada pasar atau bantuan dari luar.

Sistem ini tahan terhadap gejolak harga beras di kota atau keterlambatan distribusi logistik. Padi yang disimpan di *jurung* bisa bertahan hingga bertahun-tahun, menjadi cadangan di masa paceklik, sekaligus sumber pangan untuk ritual dan pesta adat. Gotong royong dalam masyarakat memastikan agar tidak ada satu pun keluarga dibiarkan kelaparan. Kedaulatan pangan ala Dayak ini juga berarti kedaulatan budaya. Pengetahuan tentang bibit padi merah, *pulut*, *kerekot*, *betel*, hingga *lokatan* adalah warisan yang hanya bisa dipertahankan bila masih ada tanah untuk berladang. Ritual adat dari membuka *huma*, *mangkap mentawa*, sampai doa sebelum padi pertama masuk *jurung* adalah ekspresi kedaulatan yang menyatukan pangan, alam, dan spiritualitas.

Namun, semua itu kini berada di titik genting. *Bahuma* yang dahulu menjadi jantung kehidupan perlahan digantikan oleh kebun sawit yang merangsek hingga ke tepi kampung. Perubahan pola konsumsi ikut mempercepat pergeseran, membeli beras dari pasar lebih mudah daripada menugal di ladang. Generasi muda pun semakin jarang mengenal kerja *bahuma*, lebih akrab dengan pekerjaan upahan di kebun monokultur yang

Plang Larangan Membakar Lahan & Hutan yang dipasang oleh PT. Sungai Rangit (Anak Perusahaan Sampoerna Agro), yang berlokasi di Desa Tempayung, Kec. Kotawaringin lama, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Sumber Foto: Sayogyo Institute.





Di Panahan, hanya segelintir keluarga yang masih menanam padi di ladang. Sebagian besar memilih menggantungkan hidup pada harga tandan buah sawit yang ditentukan perusahaan. "Kalau dulu orang bilang, makan dari tanah sendiri. Sekarang banyak yang beli," kata Lonen dengan nada getir.

Tempayung bahkan lebih dulu mengalami kehilangan. Sejak adanya aturan negara yang melarang pembakaran lahan, hutan justru dibuka untuk perkebunan sawit. Ladang-ladang menghilang. *Jurung* kosong, pondok-pondok di ladang lenyap, dan suara anak-anak menugal bersama orang tua tinggal cerita.

Sumiati, salah seorang Perempuan Adat dari Tempayung, mengaku bahwa hilangnya kegiatan *bahuma* membuatnya merasa kehilangan sebagian dari dirinya.

"Sejak 2006 saya tidak pernah lagi ke ladang. Hutan sudah jadi sawit. Semua berubah," kenangnya.

Aturan pemerintah ini juga tidak memberi ruang bagi pengetahuan lokal, padahal sejak dulu Masyarakat Adat Dayak punya tata cara sendiri agar penggunaan api dalam membuka ladang tetap aman dan terkendali. Di Tempayung, ada peladang yang ditangkap hanya karena mempraktikkan cara yang diwariskan leluhur. Sejak itu, rasa takut menjalar di kampung. Banyak orang memilih meninggalkan *huma* karena khawatir akan bernasib sama di balik jeruji besi.

Di Panahan, belum pernah ada peladang yang ditangkap. Ladang masih bisa dibuka dengan api, meski secara diam-diam dan penuh waswas. "Memang di sini belum ada yang ditangkap, tapi masyarakat tetap takut," ujar Lonen. Kekhawatiran itu membuat setiap langkah berladang kini dibayangi rasa cemas—antara menjaga tradisi atau berhadapan dengan hukum.



Gusti Maulidin (kiri) & Sarwani (kanan), Masyarakat Adat Rungun, Kotawaringin Lama, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, dipidana kasus kebakaran hutan & lahan pd 2019.

Sumber Foto: Budi Baskoro



Jurung yang telah lama kosong & terbengkalai akibat larangan membakar lahan, sehingga Masyarakat Adat tak lagi bisa menanam padi ladang.

Sumber Foto: Sayogjo Institute

Kebakaran hutan dan kabut asap yang selama ini dituduhkan sebagai ulah Masyarakat Adat Dayak justru dilakukan oleh industri sawit skala besar yang rakus dan membuka ribuan hektare lahan sekaligus. Namun, Masyarakat Adat Dayak dengan *huma* kecilnya yang terus menjadi kambing hitam.

Praktik yang selama berabad-abad terbukti ramah lingkungan berubah menjadi sesuatu yang dianggap kriminal. Di sisi lain, proyek *food estate* yang digadang-gadang sebagai program ketahanan pangan, malah menggusur hutan-hutan yang menjadi ruang hidup Masyarakat Adat Dayak.

Di tengah situasi seperti ini, ketika rantai pasok pangan dunia rapuh oleh perang, pandemi, dan fluktuasi pasar, *jurung* di sudut kampung Dayak membuktikan bahwa kemandirian bisa lahir dari kedekatan manusia dengan tanahnya sendiri. Dari ladang dan *jurung* itu, kita belajar bahwa sistem pangan Masyarakat Adat bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan pengetahuan yang menawarkan arah bagi masa depan.

Pengetahuan inilah—yang berakar pada relasi manusia dan alam—yang seharusnya menjadi dasar dalam menghadapi krisis iklim, kelaparan, dan kerusakan ekologi yang kian nyata hari ini.



Pemerintahan Adat: Tantangan, Mitos, & Kedaulatan

Oleh: AS Rosyid

Pemimpin adat berkumpul saat ritual maulid adat, di dalam masjid adat.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN

"Nenek moyangku seorang anarkis." Kalimat ini merupakan modifikasi dari lirik pertama lagu anak yang populer, *Nenek Moyangku Seorang Pelaut*. Anarkis di sini bukan berarti tukang rusuh, melainkan sikap tegas menolak bentuk negara imperialistik yang hanya menjadi alat kapitalisasi sumber daya alam.

Sikap itu—yang secara historis telah dipraktikkan Masyarakat Adat—kini kembali diuji oleh kebijakan negara. Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE), yang disahkan pemerintah sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, justru memunculkan kritik karena memperkuat kontrol negara atas wilayah adat dan mengabaikan hak-hak Masyarakat Adat dalam mengelola sumber daya alam. Sementara itu, uji formil terhadap UU tersebut justru ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Masyarakat Adat sebenarnya lebih membutuhkan RUU Masyarakat Adat, yang pembahasannya mangkrak hampir 15 tahun di DPR RI. Namun negara justru mengajukan RUU Konservasi yang hanya menempatkan masyarakat adat sebagai *stakeholders*, bukan *right-holders* yang berdaulat mengelola wilayah konservasi. Padahal, konservasi dalam Masyarakat Adat bukan proyek, melainkan laku hidup sehari-hari yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah, cara hidup, dan tradisinya—jauh sebelum negara ada. Dengan menempatkan Masyarakat Adat hanya sebagai pengguna, negara sejatinya telah mereduksi hak mereka sebagai pemilik sah ruang hidup.

Masalah paling serius dari RUU KSDAHE terletak pada kewenangan negara memperluas kawasan konservasi, bahkan memaksa Masyarakat Adat melepaskan tanah mereka jika menolak rencana. Undang-undang ini juga abai terhadap *free, prior, and informed consent* (FPIC). Tanpa FPIC, diskriminasi, kriminalisasi, dan perampasan hak-hak Masyarakat Adat seolah mendapat legalisasi baru. Dengan demikian, negara tampil sebagai instrumen penaklukan dan penguasaan, berhadapan dengan Masyarakat Adat yang telah lama mengatur dirinya sendiri melalui mekanisme "pemerintahan adat."



Negara dan Politik Konservasi

Di tataran tertentu Pemerintahan adat dapat dipahami sebagai bentuk *stateless society*—masyarakat tanpa negara—dengan pemusatan kewenangan berskala kecil. Pemerintahan ini biasanya diatur berdasarkan garis keturunan atau kekeluargaan, berlandaskan sistem hukum yang mapan dan diwariskan turun-temurun, serta dilengkapi dengan mekanisme musyawarah dan penyelesaian sengketa.

Dalam konteks Nusantara, mistik dan mitos merupakan bagian integral dari pemerintahan adat sekaligus cerminan iman. Unsur tersebut menopang keseluruhan sistem sosial-politik Masyarakat Adat agar pemerintahan berlangsung lebih jujur dan adil. Mistik dan mitos bukan sekadar kepercayaan, melainkan mekanisme sosial untuk menjaga kejujuran dan ketertiban.

Bagi negara, unsur mistik dan mitos dianggap sebagai hambatan. Karena itu, muncul upaya demistifikasi (pencabutan aspek mistik) dan demitifikasi (penghapusan mitos) dalam Masyarakat Adat. Strategi ini perlahan melumpuhkan praktik konservasi Masyarakat Adat, sebab praktik spiritual dan narasi kosmologis yang menopang tata kelola ruang hidup direduksi menjadi sesuatu yang dianggap tidak rasional. Dengan mencabut aspek mistik dan mitos, negara sejatinya sedang mencabut roh dari politik konservasi Masyarakat Adat.

Untuk melihat bagaimana pemerintahan adat bekerja sekaligus menghadapi tekanan tersebut, kita bisa menengok dua praktik Masyarakat Adat Sasak di Pulau Lombok.



Pemukiman Masyarakat Adat Sasak Bayan.
Sumber Foto: Raden Dedi



Praktik Pemerintahan Adat di Lombok

Wetu Telu di Desa Bayan

Masyarakat Adat Bayan, sub-suku Sasak di utara Gunung Rinjani, mengatur diri dalam pemerintahan adat bernama *Wetu Telu*. Selama ini istilah tersebut kerap menjadi stigma yang menempatkan orang Bayan sebagai penyimpang Islam, karena dianggap hanya menunaikan salat tiga kali sehari. Narasi keliru itu lebih merupakan konstruksi akademis dan politik, bukan kenyataan sehari-hari, tetapi terus direproduksi tanpa verifikasi hingga membeku sebagai narasi arus utama, merujuk pada riset-riset yang kurang teliti.

Padahal, *Wetu Telu* adalah bentuk tatanan pemerintahan yang mencerminkan ciri *stateless society*. Pemerintahan adat ini terbagi dalam tiga "kementerian": Toaq Lokaq, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan ruang hidup; kiai-kagungan, yang mengurus urusan keagamaan; serta *pembekel*, yang mengurus urusan kemasyarakatan. Pemimpin adat dipilih berdasarkan garis darah (*nasab* atau *prusa*) dan hanya boleh memutuskan perkara melalui musyawarah sakral dengan protokol ketat seperti *gundem* dan *sangkep* (forum musyawarah adat). Bagi orang Bayan, musyawarah adat adalah upacara sakral, bukan forum biasa, sehingga mekanisme ini praktis menutup peluang manipulasi oleh oknum serakah.

Dengan sistem tersebut, orang Bayan memastikan kelestarian sumber daya, hukum adat, serta tradisi-tradisi yang mendatangkan keuntungan sosioekologis. Mereka, misalnya, tidak perlu membeli air dari negara karena masih mengalir deras dari hutan adat. Saat gempa mengguncang Lombok tahun 2018, mereka bahkan rela bantuan didistribusikan ke daerah lain, sebab adat yang mereka jaga sudah menjamin kebutuhan dasar tetap terpenuhi.



Amag Lokaq, salah satu dari tiga jenis pemimpin adat bersama dengan Kiai dan Pembekel, dalam pelayanan spiritual-ekologis untuk masyarakat.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN



Pemimpin adat baru turun dari Masjid Adat Bayan yang telah berusia lebih dari separuh milenium.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.

Mengina–Mengama di Desa Sapit

Masyarakat Adat Sapit, yang mendiami lereng timur Rinjani, membagi pemerintahan menjadi dua jalur keturunan: nasab *mengina* (feminin) dan nasab *mengama* (maskulin). Pemimpin dari garis mengina bertugas mengurus ritual adat, agama, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, sedangkan pemimpin dari garis mengama berperan mengurus urusan politik dan sosial kemasyarakatan.

Dua jalur keturunan ini memiliki watak berbeda: mengina dikenal lembut dan hati-hati, sementara mengama tegas dan berani. Perbedaan watak itu memengaruhi tata kelola adat: pemimpin mengama tidak boleh mengambil keputusan yang menjadi ranah mengina. Artinya, urusan politik tidak boleh memengaruhi hutan, sungai, dan situs-situs keramat. Mengina dianggap sebagai penjaga keseimbangan kosmos, sementara mengama adalah pelindung sosial. Jika *mengina* menolak rencana pembangunan, *mengama* wajib patuh sekaligus menjadi pelindung utama tradisi ekologisnya. Pelanggaran terhadap prinsip ini diyakini akan mendatangkan *bala*.

Karena itu, masyarakat Sapit memastikan jabatan kepala desa dipegang oleh keturunan mengama. Kepala desa dari jalur mengama dianggap lebih mampu mempertahankan komunikasi dengan tradisi, sekaligus membendung penetrasi kapitalisme dan negara. Sebaliknya, ketika jabatan kepala desa pernah dipegang orang luar, hutan adat mereka berubah status menjadi perhutanan sosial.



Tantangan Internal dan Eksternal

Praktik pemerintahan adat di Bayan dan Sapit, meski terbukti membawa keuntungan sosioekologis, tidak lepas dari masalah. Tantangan yang mereka hadapi datang dari dua arah: internal dan eksternal.

Secara internal, beratnya tugas pejabat adat dan perubahan sistem mata pencaharian membuat banyak jabatan adat kosong. Regenerasi melemah, dan keturunan adat kerap enggan melanjutkan peran leluhurnya. Akibatnya, daya tahan pemerintahan adat dalam menghadapi perubahan dan mengelola ruang hidup semakin menurun.

Namun, masalah internal ini tidak berdiri sendiri. Ia sangat dipengaruhi oleh tekanan eksternal yang dijalankan negara melalui upaya *demistifikasi* dan *demitifikasi*. Pendidikan formal, misalnya, sering memberi stigma pada Masyarakat Adat Bayan sebagai muslim menyimpang, musyrik, atau ahli bid'ah. Dari sudut nonteologis, stigmatisasi ini sejatinya bagian dari strategi untuk merasionalkan masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan industrialisasi. Tradisi adat dalam menjaga sumber daya pun dicap tidak rasional dan harus digantikan oleh pendekatan sains industrial. Sejak Orde Baru, adat bahkan dipaksa tunduk pada bahasa pembangunan dan modernisasi.

Akibatnya, generasi muda yang kembali dari sekolah sering menjauh dari tradisi keluarga dan adatnya, bahkan membencinya. Sejak Orde Baru pula, tekanan ini diperparah dengan penghancuran infrastruktur adat—seperti masjid tua di Anyar, serta *gedengan* (bangunan penyimpanan sakral) dan *pedangan* (bangunan pertemuan adat) di hutan adat Montong Gedeng—dengan tuduhan PKI atau perbedaan praktik Islam. Namun, penghancuran yang paling mendasar justru terletak pada *demistikasi* dan *demitikasi* itu sendiri: pandangan bahwa praktik mistik dan mitos yang menyangga sistem adat hanyalah kebohongan besar. Bersamaan dengan itu, ekonomi tradisional yang identik dengan adat digeser oleh ekonomi modern yang dianggap lebih menjanjikan.



Para pejabat adat di Desa Bayan berkumpul dalam sebuah musyawarah untuk merespon tuntutan negara.
Sumber : Dokumentasi AMAN.

Dari sinilah lahir berbagai dampak: melemahnya regenerasi, runtuhnya kedaulatan, hingga hilangnya ketahanan pangan. Apa yang kini disebut “rasional” justru merusak tanah, laut, dan ruang hidup Masyarakat Adat. Rasionalisasi yang dipaksakan negara justru irasional bagi ekologi. Untuk memenuhi kebutuhan dasar, mereka kini bergantung pada uang—sesuatu yang tidak pernah dialami leluhur mereka. Dengan menghapus mistik dan mitos dari sistem adat, negara seakan-akan merobohkan benteng terakhir kedaulatan Masyarakat Adat.

Kisah Masyarakat Adat Bayan dan Sapit menunjukkan bahwa pemerintahan adat bukan sekadar romantisme masa lalu, melainkan sistem sosial-politik yang telah terbukti menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Dalam Masyarakat Adat, konservasi tidak dipisahkan dari iman, tradisi, dan musyawarah. Justru inilah yang membuatnya lebih tangguh menghadapi krisis ekologis dibanding logika konservasi negara yang sarat kepentingan politik dan kapital.

Namun, tekanan eksternal berupa kebijakan negara yang represif, serta tantangan internal akibat melemahnya regenerasi adat, menempatkan Masyarakat Adat pada posisi rentan. Negara hadir dengan klaim modernitas dan rasionalitas, tetapi sering kali justru meruntuhkan kedaulatan pangan, air, dan tanah mereka.

Jika pemerintahan adat terus dipinggirkan melalui stigma, *demistifikasi* dan *demitifikasi*, maka yang hilang bukan hanya tradisi, melainkan juga benteng terakhir kita dalam menghadapi krisis ekologi global. Yang dipertaruhkan bukan hanya hak Masyarakat Adat, tetapi juga masa depan ekologis Nusantara. Oleh sebab itu, tantangannya hari ini bukan sekadar mempertahankan identitas, melainkan juga memperjuangkan pengakuan penuh atas kedaulatan Masyarakat Adat sebagai *right-holders* yang sah. Hanya dengan begitu, konservasi dapat benar-benar berpihak pada keadilan ekologis dan keadilan sosial.

Diskusi Penggalan sejarah Masyarakat Adat di Desa Bayan.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN





Takkan Mati Terbakar Api Ladang Berpindah, Kebakaran Hutan & Kriminalisasi

Oleh: Bima Satria Putra
Jurnalis Masyarakat Adat
dari Kalimantan Tengah

Masyarakat Adat Dayak Ngaju menyebut kegiatan berladang dengan istilah *malan*. Dalam praktiknya, sebidang tanah hanya diolah sementara waktu, biasanya dibuka dengan cara dibakar, kemudian ditinggalkan agar kembali ke vegetasi alaminya. Sellato (1994) memperkirakan bahwa praktik perladangan berpindah yang dilakukan oleh suku Dayak sudah ada paling tidak sejak dua abad lalu. Sementara itu, Mering (dalam Siahaya dkk., 2016) menyatakan bahwa cara bercocok tanam yang beragam di Kalimantan telah dilakukan sejak 6000 tahun SM (Siahaya dkk., 2016). Ladang berpindah menjadi wujud nyata kearifan lokal, bukan hanya karena mencerminkan budaya, tetapi juga karena menampilkan kebijaksanaan Masyarakat Adat yang memahami kondisi dan kebutuhan wilayahnya sendiri.

*Peladang Dayak Membakar Lahan di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
Sumber Foto: Dokumentasi Proyek Suku Api.*





Sayangnya, kebijakan pemerintah sering kali bertentangan dengan kearifan lokal tersebut. Pada era Orde Baru, pemerintahan Suharto melaksanakan proyek ambisius yang dikenal sebagai *Mega Rice Project* (MRP) tahun 1995 di Kalimantan Tengah. Pemerintah membuka satu juta hektar lahan gambut—setara dengan dua pulau Bali—untuk dijadikan sawah, serta mendatangkan seratus ribu transmigran dari Jawa dan Bali. Namun, paradigma teknokratik Orde Baru terbukti keliru. Lahan gambut miskin unsur hara dan tidak cocok untuk padi yang berasal dari Jawa-Bali. Proyek itu gagal total dan menyisakan lahan gambut kering yang setiap tahun terbakar dalam skala besar.

Sejak awal, pemerintah Suharto telah menuding peladang sebagai penyebab kebakaran besar pada tahun 1980-an, guna menutupi kegagalan proyek perkebunan besar yang sedang digalakkan (Eilenberg, 2022). Maka, persoalan ini bukan sekadar kesalahan kebijakan, melainkan hasil dari struktur ekonomi-politik yang meminggirkan Masyarakat Adat. Ketika kepentingan besar tidak bisa diganggu, pemerintah memilih mencari kambing hitam dari kelompok yang paling mudah disalahkan—yakni peladang tradisional.

**Menugal, teknik menanam padi ladang,
Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan.**
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN





*Presiden Joko Widodo (Jokowi)
memantau lokasi kebakaran hutan.
Sumber Foto: Dokumentasi
Sekretariat Kepresidenan*

Peladang: Kambing Hitam Karhutla

Pada masa kolonial Hindia Belanda, praktik ladang berpindah telah dilarang sejak 1874. Penduduk diharuskan memperoleh izin resmi sebelum membuka hutan untuk pertanian (Fox, 2009). Pemerintah kolonial bahkan memaksa Dayak Iban turun ke dataran rendah dan beralih ke persawahan, meski akhirnya banyak kembali ke perbukitan untuk berladang (Eilenberg, 2022). Kini, pembakaran lahan diatur dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No. 39/2014 tentang Perkebunan. Untungnya, aturan ini sering tidak diterapkan secara ketat oleh aparat dan pemerintah lokal yang memahami nilai kearifan lokal.

Namun, situasi berubah pada 2015 ketika kabut asap tebal mengganggu negara tetangga dan menimbulkan kerugian ekonomi hingga 16 miliar dolar AS. Presiden Joko Widodo kemudian menerbitkan Inpres No. 11/2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla). Empat tahun kemudian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan komitmen untuk mengakhiri praktik tebang-bakar di kalangan peladang tradisional (Gorbiano, 2019). Sejak saat itu, kriminalisasi terhadap peladang meningkat tajam.



Tahun 2019 disebut sebagai “tahun terkelam peladang tradisional” karena 35 peladang dikriminalisasi hanya di Kalimantan Tengah (Betahita, 2019). Di seluruh Kalimantan, ratusan peladang telah mengalami hal serupa. Gelombang kriminalisasi itu memicu solidaritas dari aktivis agraria, lingkungan, dan Masyarakat Adat yang menuntut keadilan. Tuduhan bahwa peladang adalah penyebab utama karhutla perlu dipertanyakan, sebab banyak bukti menunjukkan sebaliknya.

Pertama, budaya berladang berpindah telah lama diteliti oleh berbagai ahli sosial dan lingkungan hidup. Rujukan ilmiah menunjukkan bahwa pembakaran lahan dalam sistem perladangan tradisional dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Sebelum membakar, Masyarakat Adat berkoordinasi dengan pemilik lahan sekitar, menginap di ladang selama proses pembakaran, serta membuat parit dan sekat api. Pembakaran dilakukan bersama-sama dan diawasi agar tidak merambat ke lahan lain. Kebakaran yang meluas dianggap aib dan dapat dikenai sanksi adat karena bisa merusak kebun buah, lahan keramat, atau ladang yang sedang diistirahatkan.

Kedua, sebagian besar kasus karhutla justru terkait dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit. Menurut Eilenberg (2022), pembakaran merupakan cara termurah dan tercepat untuk membuka lahan baru. Praktik ini juga terkait dengan sistem patronase antara pejabat lokal, kelompok tani, dan investor. Keuntungan besar dari pembakaran membuat pihak korporasi dan elit lokal nyaris kebal hukum. Data WALHI Kalimantan Tengah mencatat 87 titik api pada Juni–Agustus 2017, dengan 14 di antaranya berada dalam konsesi perusahaan sawit di delapan kabupaten. Sementara itu, dari 161 kasus individu karhutla tahun 2019, 121 orang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi dari 20 kasus korporasi hanya dua perusahaan—PT Palmindo Gemilang Kencana dan PT Gawi Bahandep Sawit Mekar—yang dijerat hukum (Betahita, 2019). Ini menunjukkan ketimpangan besar dalam penegakan hukum.



Larangan membakar ladang di perbatasan Desa Tempayung dan Desa Babual Baboti.
Sumber Foto: Dokumentasi Sayogyo Institute.



Ketiga, meski peladang tradisional terus dikriminalisasi, bencana karhutla justru semakin parah. Data NASA yang dikutip Mongabay (2007) menyebutkan karhutla 2006 sebagai yang terburuk sejak 1998. Field (2016) melaporkan karhutla 2015 lebih besar dibandingkan dekade sebelumnya. Sakinah dkk. (2019) mencatat bahwa data Global Forest Watch menunjukkan karhutla 2019 lebih luas daripada 2016–2018, dan Greenpeace (2023) menilai karhutla 2023 jauh lebih parah hingga disebut “kronis.” Fakta ini menunjukkan bahwa pendekatan represif terhadap peladang tidak menyelesaikan masalah. Bahkan, kebakaran terus meningkat seiring meluasnya perkebunan kelapa sawit, sementara jumlah peladang tradisional justru menurun.

Penurunan ini nyata. Fox (2009) mencatat bahwa sistem ladang berpindah di Asia Tenggara telah “berubah dan terkadang menghilang dengan kecepatan yang belum pernah dialami sebelumnya.” Liputan Ahmad Arif & Dionisius Reynaldo Triwibowo (2022) di *Kompas* menemukan bahwa di Kalumpang, Kapuas, Kalimantan Tengah, kegiatan berladang terakhir dilakukan pada 2015. Data AMAN Kalimantan Tengah (2024) menunjukkan bahwa di Pondok Damar, Kotawaringin Timur, ladang terakhir dibuka pada 2004. Tren ini memperlihatkan kepunahan perlahan atas sistem pertanian tradisional yang pernah menjadi penopang budaya Dayak.

Dengan tiga alasan tersebut, jelas bahwa peladang bukan penyebab utama karhutla. Bahkan jika seluruh peladang dipenjara, kebakaran hutan dan kabut asap tidak akan berhenti selama ekspansi sawit masih dilakukan dengan membakar lahan. Masyarakat Adat tidak akan terbakar oleh api yang diciptakan dengan penuh kearifan; api yang membumihanguskan berasal dari sumber yang jauh lebih besar.

Dua peladang di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, membawa suluh obor untuk membakar lahan.
Sumber Foto: Dokumentasi Proyek Suku Api





Jaga Kearifan Lokal, Jaga Warisan Budaya

Berladang telah membentuk tatanan sosial dan pandangan dunia bagi Masyarakat Adat Dayak. Gotong royong menggarap ladang secara bergilir mempererat solidaritas, sementara pesta panen menjadi perayaan tahun baru Dayak. Banyak ritual dan tradisi adat lahir dari siklus berladang. Jika budaya berladang hilang, maka hancurlah sendi-sendi kebersamaan dan perayaan yang selama ini menjadi jiwa kehidupan Masyarakat Adat.

Kini, kearifan lokal Dayak berada di ambang kepunahan. Hanya bahasa tradisional seperti Dayak Ngaju yang masih dituturkan sekitar 1,4 juta orang di Kalimantan Tengah. Namun, pilar utama kehidupan tradisional—mulai dari rumah panjang hingga pola hidup subsisten—telah runtuh sedikit demi sedikit selama lebih dari seabad. Kolonial Hindia Belanda melalui “Perjanjian Tumbang Anoi” tahun 1894 melarang *pengayauan* dan pemukiman berpindah. Pemerintah Orde Baru juga mendiskriminasi kepercayaan tradisional dengan hanya mengakui lima agama resmi berdasarkan TAP MPR RI IV/MPR/1978. Stigma terhadap rumah panjang yang dianggap kumuh mendorong Masyarakat Adat meninggalkan gaya hidup leluhur demi memenuhi standar pembangunan.

Komunitas Masyarakat Adat Muara Tae, Kutai Barat, Kalimantan Timur sedang melakukan penanam benih di ladang.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN





Pemerintah pasca reformasi sejatinya melanjutkan pendekatan lama. Jika dahulu peladang disebut perambah hutan, kini disebut pembakar lahan. Kriminalisasi terhadap pertanian tradisional menjadi strategi politik untuk menutupi akar struktural bencana lingkungan. Pemerintah menyederhanakan masalah yang kompleks dan sistemik menjadi seolah-olah kesalahan Masyarakat Adat semata.

Kebudayaan berladang adalah warisan masa depan yang kini terancam punah. Jika larangan membakar lahan dan kriminalisasi terus berlangsung, sementara korporasi yang diuntungkan dari karhutla dibiarkan bebas, maka kearifan lokal ini akan hilang. Fox (2009) mengingatkan bahwa musnahnya sistem perladangan berpindah disebabkan oleh banyak faktor: marginalisasi etnis minoritas, pembagian kawasan menjadi hutan dan pertanian permanen, ekspansi konservasi dan kehutanan, privatisasi lahan, hingga perubahan mata pencaharian akibat urbanisasi dan industrialisasi.

Bisa jadi, di masa depan, berladang berpindah tidak lagi menjadi bagian dari pertanian, melainkan atraksi wisata. Masyarakat Adat yang masih berladang akan dijadikan tontonan eksotis di kampung adat; kegiatan berladang hanya untuk menghibur wisatawan, bukan untuk mengisi lumbung pangan. Pada saat itu, hutan dan lahan yang tersisa telah dikonversi sepenuhnya menjadi perkebunan kelapa sawit. Tidak ada lagi karhutla karena tidak ada lagi hutan yang tersisa untuk terbakar. Biasanya, ketika kesadaran itu datang, semuanya sudah terlambat.



*Satu-satunya Ladang Padi Gunung yang tersisa milik Masyarakat Adat Suku Balik di Pemaluan.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.*



Leuit, Tabungan Pangan untuk Keberlanjutan

Oleh: **Dika Setiawan**

Jurnalis Masyarakat Adat dari Banten Kidul

Ketahanan pangan menjadi isu global yang semakin mendesak. Perubahan iklim yang tak menentu membuat hasil panen berkurang, distribusi terganggu, hingga harga pangan melonjak. Dampaknya sudah terasa nyata di berbagai wilayah: sawah gagal panen, ladang mengering, masyarakat kesulitan membeli bahan pokok.

Pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu memperlihatkan betapa rapuhnya sistem pangan dunia. Pasar kosong, suplai terputus, dan krisis meluas ke mana-mana. Namun, di tengah kepanikan itu, Masyarakat Adat Kasepuhan Cipta Mulya di lereng Gunung Halimun tampak tenang. Persediaan pangan mereka tetap aman. Rahasia ketangguhan itu ada pada sebuah bangunan panggung sederhana bernama *leuit*—lumbung padi tradisional yang diwariskan turun-temurun.

Leuit, Penyangga Kehidupan

Leuit bukan sekadar tempat menyimpan padi. Ia adalah jantung kehidupan Masyarakat Adat. Setiap keluarga di Kasepuhan Cipta Mulya memiliki satu hingga dua *leuit*, bahkan lebih. Semua hasil panen dari huma (ladang) dan sawah dimasukkan ke dalam *leuit*. Dengan cara penyimpanan tradisional, padi bisa bertahan hingga puluhan tahun tanpa bantuan teknologi modern.

Bagi warga Kasepuhan, padi bukan hanya makanan. Ia adalah nyawa, sumber kehidupan. Menjual padi sama artinya menjual hidup. Karena itu, aturan adat melarang keras penjualan padi. “Padi adalah sumber kehidupan. Karena itu padi tidak boleh dijual, hanya boleh disimpan di *leuit*,” kata Abah E. Suhendri Wijaya, Ketua Adat Kasepuhan Cipta Mulya.



Masyarakat Adat Kasepuhan Cipta Mulya memasukkan padi ladang yang ditanam di huma ke leuit dalam prosesi adat Seren Taun.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



Selain *leuit* keluarga, ada pula *Leuit* Si Jimat, lumbung komunal yang diisi bersama. *Leuit* ini berfungsi sebagai penyangga ketika ada warga yang kekurangan pangan. “Kalau ada masyarakat yang kekurangan, bisa mengambil dari sini. Tapi sampai sekarang belum pernah ada yang meminta. Kalau bisa jangan sampai *ngambil*. Bukannya tidak boleh, tapi kalau sampai mengambil berarti stok pangan masyarakat bisa jadi tidak aman,” ujar Abah sambil bercanda.

Leuit menjadi bukti bahwa kearifan lokal bisa menjadi benteng menghadapi krisis. Ia bukan hanya gudang, melainkan tabungan pangan, simbol kemandirian, dan warisan leluhur bagi generasi mendatang.

Bertani Sekali Setahun

Keberlangsungan *leuit* tak lepas dari sistem pertanian yang disiplin. Warga Kasepuhan Cipta Mulya hanya menanam padi sekali dalam setahun. Filosofinya sederhana, tetapi sarat makna: bumi adalah ibu, langit adalah bapak. Tanah dianggap sebagai ibu yang melahirkan padi sebagai anak.

“Seorang ibu tidak mungkin melahirkan dua kali dalam setahun. Karena itu tanah harus diberi waktu istirahat untuk memulihkan kesuburannya,” jelas Abah.

Dalam praktiknya, masyarakat selalu menengok rasi bintang sebelum bercocok tanam. Pergerakan bintang dipercaya sebagai penanda waktu yang tepat untuk memulai aktivitas pertanian. “Pertanian tidak bisa sembarangan. Semua harus mengikuti perhitungan langit agar hasil panen baik,” kata Abah.

Masyarakat Adat Kasepuhan Cipta Mulya memanen padi ladang (huma) secara hati-hati dengan menggunakan ani-ani.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.





Huma dan Sawah

Pertanian di Kasepuhan terbagi dalam dua bentuk: *huma* (ladang) dan sawah. Di *huma*, pembukaan lahan dilakukan dengan pembakaran terbatas. Abu dan arang dari sisa pembakaran menjadi pupuk alami bagi tanah. Selain padi, warga menanam jahe, jagung, timun, dan beragam tanaman lain. Diversifikasi ini bukan sekadar untuk pangan tambahan, tapi juga strategi menjaga padi dari serangan hama. "Selain bisa dikonsumsi, tanaman itu juga menjaga padi. Yang tadinya hama mau menyerang padi, malah beralih ke tanaman lain, jadi hama tidak dibunuh, tapi diberi makan dengan tanaman lain agar tidak merusak padi" kata Abah.

Di sawah, prinsip keseimbangan alam diterapkan dengan cara lain. Setelah panen, sawah diisi ikan. Karena padi hanya ditanam sekali setahun, ada jeda sekitar lima hingga enam bulan sebelum musim tanam berikutnya. Waktu itu dipakai untuk memulihkan tanah. "Sehabis panen, sawah kami isi ikan. Ikan membantu menyuburkan tanah. Jadi tanpa pupuk pun padi bisa tumbuh subur," ujar Abah.

Sistem ini berjalan tanpa pestisida. Larangan adat tegas: tidak boleh menyemprot padi dengan bahan kimia karena bisa merusak ekosistem. "Kalau ekosistem rusak, keseimbangan alam juga rusak. Kalau alam rusak, bencana semakin dekat dengan kita," kata Abah.

Pelajaran dari Kasepuhan

Bagi Masyarakat Adat Kasepuhan Cipta Mulya, alam sudah mengatur hak dan bagian setiap makhluk hidup. Ada waktunya manusia bekerja, ada pula saatnya beristirahat. Ada masanya tanah menghasilkan, ada pula masa tanah harus dipulihkan.

Karena patuh pada aturan alam, hasil panen selalu cukup. Padi tetap melimpah meski ditanam hanya sekali setahun. *Leuit* tetap penuh meski tanpa teknologi modern. Filosofi itu membuat mereka teguh menjaga keseimbangan alam sekaligus memastikan ketahanan pangan jangka panjang.

Padi bukan sekadar butiran beras, tetapi sumber kehidupan yang tak ternilai. Dengan menyimpannya di *leuit*, Masyarakat Adat menabung kehidupan sekaligus menjaga martabat.

Di saat dunia sibuk mencari solusi pangan melalui teknologi modern, Masyarakat Adat menunjukkan bahwa kearifan tradisional bisa lebih tangguh. *Leuit* adalah tabungan pangan, penyangga hidup dan pengingat bahwa harmoni dengan alam adalah kunci keberlanjutan.





*Almontana Paat bersama masyarakat lokal di kebun kopi sekitar Gunung Mahawu.
Sumber Foto: Dokumentasi BPAN Sulawesi Utara.*

Mawale: Menyemai Kopi, Menyemai Identitas

Oleh : Belarmino M. Lapong
BPAN Minahasa, Sulawesi Utara

Almontana Paat sudah terbiasa bangun sebelum matahari menampakkan diri dari balik bukit. Pemuda adat Minahasa itu memulai hari dengan merawat kebun kopinya di Tomohon. Sejak 2017, lahan itu ia tanami ribuan pohon kopi. Dari sana pula bibit kopi menyebar ke berbagai penjuru Minahasa, menjadi simbol kebangkitan pertanian di tanah leluhur.

Pria yang akrab disapa Emon itu merantau ke Jepang setelah menamatkan sekolah menengah. Di Negeri Sakura ia belajar pertanian, khususnya kopi. Ia tekun mempelajari teknik menyeduh, hingga piawai mengeluarkan aroma dan rasa biji kopi. "Saya menemukan jalan hidup melalui kopi," katanya. Di negeri asing itu pula ia berkeluarga, lalu memutuskan kembali ke Minahasa.

Sekitar 2017, Emon dan istrinya pulang ke Tomohon, kota di ketinggian 800–1.200 meter di atas permukaan laut yang sejuk dan cocok untuk ditanami berbagai tanaman, termasuk kopi. Sejak masa kolonial Belanda memberlakukan sistem *cultuurstelsel*, kopi memang sudah menjadi bagian lanskap Minahasa. Nicolaas Graafland, misionaris Belanda, menuliskannya dalam buku *Minahasa Masa Lalu dan Masa Kini* (1864).

Kehidupan modern di Jepang tak menghapus niat Emon pulang kampung. Ia teringat masa sekolah ketika mengikuti Sekolah Mawale, forum diskusi tentang keminahasaan. Dari sana ia tahu kopi pernah menjadi komoditas unggulan. "Awalnya saya belajar bersama petani kopi Koya, Tondano," ujarnya. "Mereka lama menanam kopi, tapi hanya untuk pasar lokal. Harga satu kilo tidak pernah lebih dari seratus ribu rupiah. Kami ajarkan cara tanam, rawat, dan olah pascapanen supaya kualitas naik."



Emon bersama Masyarakat Adat di lereng Gunung Mahawu menyemai Bibit kopi.
Sumber Foto: Dokumentasi BPAN Sulawesi Utara

Tantangannya berat. Stigma negatif tentang kopi masih kuat. Pada masa kolonial, hasil terbaik diangkut pemerintah Belanda, sedangkan yang tersisa bagi petani hanyalah kopi cacat. Tradisi itu menempel lama di Tondano: kopi dianggap rendah mutu. Untuk mengubahnya, Emon mendatangkan ahli dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao dengan biaya sendiri. Selain membina petani, ia menanam 300 pohon kopi pertama di lahannya.

Tahun 2019 menjadi titik balik. Emon bertemu para pemuda adat di Kumelembuai, kampung di balik Pegunungan Mahawu. Bersama mereka ia merintis kebun kopi rakyat, memilih Arabika dan Liberika sebagai andalan. Kumelembuai, seperti kampung lain di Mahawu, sudah lama dikenal sebagai penghasil kopi berkualitas.

Seiring waktu, jejak Emon melebar. Dari Koya dan Kumelembuai, tapaknya menjangkau Rurukan, Kinilow di sekitar Gunung Empung, Pangolombian di puncak Tampusu, hingga Tandengan. Delapan hingga sepuluh ribu pohon kopi Arabika, Robusta, dan Liberika kini tumbuh subur. Semua hasil kolaborasinya dengan petani binaan.

Emon bukan hanya petani. Ia juga musisi. Sejak remaja ia dikenal lewat grup musik *Payus*. Kini ia membuktikan perantau yang pulang bisa membawa perubahan nyata. Baginya, kopi bukan sekadar komoditas, melainkan identitas Tou Minahasa. "Kopi bisa menopang kehidupan kampung-kampung," katanya. Semakin banyak pemuda yang ikut menanam, masyarakat pun mulai melihat kopi sebagai harapan.

Pada 2017, ia mendirikan Elmonts Coffee & Roastery di Tomohon. Kedai ini bukan hanya tempat minum kopi, tapi ruang belajar bagi pemuda adat. Mereka dilatih mengolah dan menyeduh kopi, hingga bisa membuka kedai sendiri. Emon membeli kopi petani dengan harga Rp135–165 ribu per kilogram, jauh lebih tinggi dari harga lama. "Selama petani punya pasar sendiri, mereka bisa hidup layak," ucapnya.

Filosofi itu menjadi napas gerakan Emon. Ia ingin membuktikan bahwa petani tidak perlu menunggu pengakuan dari luar. Cukup hasil panen dihargai dengan layak. Konsistensi itu membuatnya dikenal luas.



Gerakan Emon berakar pada semangat *Mawale*—pulang kampung—yang berkembang di Minahasa sejak awal 2000-an. Gerakan ini mendorong pemuda kembali ke akar leluhur. Rikson C. Karundeng, AMAN Sulawesi Utara, mengenang Emon sebagai kawan lama. Mereka bertemu di Sekolah *Mawale* 2006–2008. “Emon berminahasa lewat musik. Dia menggugah kesadaran teman-teman akan identitas,” kata Rikson. Kini, kata dia, Emon melanjutkan lewat kopi.

Selepas merantau ke Jepang, Emon membangun usaha kopi dari hulu ke hilir: menanam, mengolah, menyeduh, membuka kedai, dan melatih pemuda adat. Rikson mengenang pertanyaan yang pernah ia lontarkan: apakah Emon tidak khawatir melatih anak-anak muda yang bisa jadi pesaingnya kelak? Emon menjawab singkat, “Biarlah nanti Opo Empung menyiapkan tempat bagi kita masing-masing.”

Emon juga membuat pupuk organik sendiri. Inovasi itu menunjukkan keberpihakan pada lingkungan. Ia ingin membuktikan bahwa membangun kampung bisa dilakukan dengan cara ramah alam.

Atas konsistensinya, Bank Indonesia pernah mengundangnya sebagai narasumber pengembangan ekonomi pemuda Sulawesi Utara, terutama di bidang pertanian. Ia terbuka membagi pengetahuan, melatih pemuda adat menjadi barista andal, hingga membuka usaha kopi sendiri.

“Ini cara Emon ber-*Mawale*, menghidupkan kembali adat dan kesadaran membangun kampung,” kata Rikson. Menurutnya, Emon membuktikan bahwa bertani kopi memang berat dan butuh modal, tapi bisa dilakukan dengan cinta dan komitmen.

Kisah Emon memperlihatkan bagaimana pengetahuan lokal berpadu dengan ilmu modern. Sinergi itu menghasilkan jalan baru membangun kampung. Dari menanam kopi, mengolah, hingga mendirikan Elmonts Coffee & Roastery, Emon menegaskan bahwa lahan kampung bukan sekadar tanah, melainkan aset berharga bila diolah dengan benar.

Spirit *Mawale* yang ia bawa membangkitkan semangat pemuda adat lain. Perjalanannya—dari Jepang, kembali ke Minahasa, lalu membangun dengan kesadaran penuh—menjadi inspirasi banyak orang. Ia bukan hanya menanam kopi, tapi juga menanam harapan dan identitas di tanah leluhur.

“Menanam adalah menjaga rumah sendiri,” katanya. Bagi Emon, setiap pohon kopi yang tumbuh adalah janji setia mempertahankan wilayah adat. Sebuah warisan yang hanya bisa dijaga dengan tangan anak-anaknya sendiri.

Produk kopi yang disajikan di Elmonts Coffee & Roastery
Sumber Foto: Dokumentasi BPAN Sulawesi Utara.





Konsolidasi Perempuan Pemimpin Masyarakat Adat Nusantara: Mercusuar Peradaban & Penjaga Kehidupan

Oleh: Joanny F. M. Pesulima
Jurnalis Masyarakat Adat dari Maluku.

"Perempuan Adat, semangat! Perempuan Adat maju! Perempuan Adat pantang menyerah!"—pekikan ini bergema dalam kegiatan Konsolidasi Perempuan Pemimpin Masyarakat Adat Nusantara dalam rangka memperingati Hari Masyarakat Adat Internasional Sedunia (HIMAS) yang diselenggarakan di Kasepuhan Guradog, Kecamatan Curugbitung, Lebak, Banten, 7–10 Agustus 2025.

Kegiatan ini melibatkan Perempuan Adat Ketua PH AMAN Wilayah maupun Daerah, Perempuan Adat Dewan AMAN Nasional, Wilayah, dan Daerah, perwakilan dari PEREMPUAN AMAN, perwakilan Perempuan Pemuda Adat, Perempuan Adat di struktur pemerintahan adat, Perempuan Adat penjaga pengetahuan Masyarakat Adat, Perempuan Adat pemimpin perlawanan di kampung, Perempuan Adat penggerak, Perempuan Adat pemimpin organisasi dan gerakan Masyarakat Adat, Perempuan Adat pengampu ritual dan peramu obat, Srikandi Seko, Hutan Perempuan Papua, Perempuan Adat di kedaulatan pangan, Perempuan Adat penggerak sekolah adat, serta Perempuan Adat yang aktif di masa pandemi.



*Para peserta Konsolidasi Perempuan Pemimpin Masyarakat Adat Nusantara tampak bersemangat mengikuti kegiatan.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.*



Perempuan Adat: Pilar Kehidupan dan Mercusuar Peradaban

Menurut Lenny Patty, Ketua PHW AMAN Maluku, konsolidasi ini jauh melampaui pertemuan formal. “Perempuan adat adalah penjaga kedaulatan dan keberlangsungan Masyarakat Adat. Masyarakat Adat bukan pelengkap, tetapi subjek aktif yang menjaga identitas kolektif, melestarikan pengetahuan tradisional, dan memimpin perjuangan mempertahankan wilayah adat dari ancaman eksternal,” ujarnya. Kepemimpinan perempuan adat bukan hanya soal posisi formal, tetapi tentang membangun politik yang inklusif, egaliter, menghargai keragaman sosial-budaya, serta memperkuat kapasitas kolektif berbasis Masyarakat Adat dan nilai tradisional.

Perempuan adat memegang peran strategis yang tidak tergantikan. Melestarikan pengetahuan tradisional—pengobatan, pertanian berkelanjutan, pengetahuan ekologis—serta menjaga sistem nilai adat yang diwariskan lintas generasi. Perempuan adat juga yang memimpin gerakan perlawanan terhadap perampasan wilayah adat. Kongres Masyarakat Adat Nusantara VI (KMAN VI) di Jayapura pada 2022 menegaskan bahwa perempuan adat adalah pilar utama perjuangan Masyarakat Adat, mulai dari pelestarian budaya dan bahasa, pendidikan, ekonomi lokal, hingga advokasi hukum dan kebijakan publik.

Empat narasumber utama hadir untuk berbagi pengalaman dan strategi nyata: Rukka Sombolinggi (Sekjen AMAN), Ija Khadijah (Anggota DPRD Kabupaten Lebak), Mama Aleta Baun (Penggerak Masyarakat Adat Tiga Batu Tungku), dan Mama Rosalina Gaelagoy (Penggerak dari Masyarakat Adat Marfepen). Kehadiran mereka membuka ruang belajar dan refleksi kritis, serta menunjukkan bagaimana Perempuan Adat menjadi subjek politik aktif.

Debbi Rambu, Ketua PHW AMAN Sumba, menekankan bahwa gerakan Perempuan Adat selalu dimulai dari kampung. Perjuangannya lahir dari ketidakadilan atau ancaman terhadap wilayah adat. Debbi menceritakan proses panjang yang harus dilalui Perempuan Adat: gelisah, jatuh-bangun, belajar, hingga akhirnya bertindak. “Empat kunci keberhasilan Perempuan Adat adalah tahu, mau, bisa, dan melakukan. Mereka yang sukses memahami persoalan, mau bertindak, mampu mengorganisasi Masyarakat Adat, dan melakukan tindakan nyata, sambil tetap menjaga keseimbangan kehidupan pribadi dan keluarga,” ujarnya.

Sekjen AMAN bersama Empat Perempuan Adat mengantarkan diskusi pembuka agenda konsolidasi Perempuan Pemimpin Masyarakat Adat.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.





Mama Aleta Baun berbagi pengalamannya mengorganisir Masyarakat Adat untuk menolak tambang masuk di wilayah adatnya. Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.

Mama Aleta Baun di Mollo menjadi contoh nyata kepemimpinan ini. Berhadapan dengan tambang yang merusak hutan dan wilayah adat, ia mengorganisir Masyarakat Adat, membangun solidaritas lintas desa, dan mengadvokasi perlindungan wilayah adat melalui hukum dan ritual adat. Ritual adat yang dilaksanakan bukan sekadar simbol, tetapi instrumen nyata perlindungan wilayah dan sumber daya, memastikan Masyarakat Adat tetap memiliki kontrol atas tanah, hutan, dan budayanya. Pemetaan batas wilayah, penandaan sungai, lembah, dan hutan, serta penyuluhan membangun kesadaran akan pentingnya menjaga wilayah leluhur.

Sementara itu, di kesempatan yang sama, Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi menegaskan bahwa Perempuan Adat adalah gerbang kampung dan mercusuar peradaban. "Kalau gerbang kampung tidak dirawat, rusak, atau hancur, maka tidak ada lagi penanda bahwa ini adalah kampung," ujarnya. Rukka menyoroti pentingnya pemetaan wilayah adat sebagai strategi pertahanan Masyarakat Adat. Data menunjukkan bahwa di seluruh Nusantara terdapat 2.567 komunitas Masyarakat Adat dengan total sekitar 20 juta jiwa. Dalam tiap Masyarakat Adat, minimal 2 persen orang dewasa harus terdata agar organisasi tahu siapa yang bisa dihubungi ketika ada masalah. Dari jumlah tersebut, 30 persen harus perempuan dan 30 persen generasi muda agar pertahanan kampung kuat dan berkelanjutan.

Selain politik dan budaya, perempuan adat juga memegang peran penting dalam ekonomi lokal dan kedaulatan pangan. Rukka menegaskan agar sumber daya alam tetap dikontrol Masyarakat Adat. "Kita tidak boleh menjual air, tanah, gunung batu, atau pohon hutan yang bukan milik kita, tetapi kita boleh menjual hasil kebun dan kerajinan lokal." Dengan demikian, perempuan adat menjadi jangkar ekonomi, menjaga kedaulatan Masyarakat Adat dan melindungi kampung dari perampasan aset adat.



Strategi Kolektif, Tantangan, dan Jejak Perjuangan

Konsolidasi ini juga menyoroti tantangan struktural yang dihadapi perempuan adat. Perempuan Adat sering dipinggirkan dalam pengambilan keputusan adat maupun negara. Namun, itu tidak boleh menghalangi Perempuan Adat untuk mengorganisir Masyarakat Adat, memimpin pendidikan, melestarikan budaya, dan menjaga ekonomi lokal. Strategi Perempuan Adat bersifat kolektif dan berlapis: dari tingkat kampung, wilayah, hingga nasional, mereka membangun jaringan solidaritas, advokasi kebijakan, dan pemetaan wilayah untuk memastikan kelangsungan hidup, budaya, dan wilayah adat.

Debbi menambahkan bahwa perjuangan Perempuan Adat bukan sekadar tentang tindakan heroik, tetapi juga proses panjang belajar, jatuh-bangun, dan membangun kapasitas diri serta Masyarakat Adat. Banyak Perempuan Adat sukses karena mau berkorban, menjalin hubungan dekat dengan wilayah adat, dan terus belajar. Perempuan Adat tidak minder meski menghadapi korporasi besar, tidak menyerah meski menghadapi tekanan sosial, dan tetap menyeimbangkan kehidupan pribadi dan keluarga. Kepemimpinan Perempuan Adat bersifat visioner, kolektif, dan berkelanjutan, menyatukan nilai tradisional, spiritualitas, dan strategi praktis.

Perempuan Adat juga menunjukkan bagaimana aksi kolektif dapat menghasilkan dampak nyata. Dalam berbagai konflik wilayah adat, perempuan mengorganisir Masyarakat Adat untuk menghalau proyek ekstraktif, melakukan advokasi hukum, melestarikan ritual dan tradisi, serta memastikan kedaulatan pangan tetap terjaga. Dari kisah Mama Aleta di Mollo dan pernyataan Rukka, terlihat bahwa perempuan adat mampu menggabungkan nilai tradisional, spiritualitas, solidaritas dan strategi politik untuk memperkuat posisi Masyarakat Adat.

Kisah-kisah ini memberikan pelajaran penting: keberhasilan perempuan adat lahir dari kesadaran akan tanggung jawab, keberanian bertindak, dan solidaritas kolektif. Perempuan Adat mengajarkan bahwa mempertahankan identitas, budaya, dan wilayah adat adalah perjuangan panjang yang membutuhkan ketekunan, strategi, dan keyakinan bahwa generasi berikutnya harus mewarisi kehidupan yang utuh, berdaulat, dan berkeadilan.



Perempuan Adat merumuskan strategi perjuangan gerakan Masyarakat Adat.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



Dengan pemetaan strategis, solidaritas lintas Masyarakat Adat, dan kepemimpinan visioner, Perempuan Adat memastikan kampung tetap teguh, sumber daya alam tetap terkendali, budaya dan pengetahuan tetap hidup. Lebih jauh, konsolidasi ini menegaskan bahwa kekuatan perempuan adat berakar pada keseimbangan antara tradisi, pengetahuan lokal, dan strategi politik modern. Ritual adat bukan sekadar simbol, tetapi sarana memelihara hutan, menandai wilayah, dan memperkuat kesadaran Masyarakat Adat. Pemahaman tentang adat dan sejarah leluhur memungkinkan perempuan adat bertindak tepat dalam menghadapi ancaman eksternal, menjaga agar tanah, hutan, dan budaya tidak hilang ditelan arus modernisasi.

Debbi menambahkan, keberhasilan perempuan adat juga lahir dari jaringan sosial yang kuat dan kapasitas kolektif. Perempuan Adat membangun solidaritas mulai dari keluarga, tetangga, hingga seluruh kampung. "Kalau akar lemah, setinggi apa pun pohonnya pasti tumbang diterpa angin. Oleh karena itu, kita mulai dari kampung, dari akar, untuk membangun jaringan yang kokoh," ujarnya. Strategi ini terbukti efektif dalam menghadapi perampasan tanah dan konflik sumber daya, karena Masyarakat Adat yang terorganisasi memiliki kekuatan tawar yang nyata, baik di level lokal maupun nasional.

Dengan segala tantangan yang ada—patriarki, marginalisasi, dan tekanan kapitalisme—perempuan adat terus menunjukkan kepemimpinan visioner dan kolektif. Perempuan Adat membuktikan bahwa perubahan bukan hanya soal posisi formal, tetapi soal membangun kapasitas Masyarakat Adat, merawat pengetahuan lokal, dan menghubungkan ritual serta spiritualitas dengan strategi politik praktis. Kesadaran ini menegaskan bahwa perempuan adat bukan sekadar bagian dari Masyarakat Adat, melainkan penggerak utama peradaban, mercusuar yang menerangi jalan bagi generasi mendatang.



Perempuan Adat mendiskusikan arah perjuangan gerakan Masyarakat Adat.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



Masyarakat Adat Internasional Apresiasi Perayaan HIMAS 2025 di Kasepuhan Guradog Banten

Perwakilan Masyarakat Adat dari berbagai negara mengapresiasi jalannya perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) 2025 yang dilaksanakan oleh AMAN di Kasepuhan Guradog, Kabupaten Lebak, Banten.

Mereka menilai perayaan HIMAS 2025 yang dirangkai dengan deklarasi Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara dan pertemuan Perempuan Pemimpin ini cukup berhasil dan sukses menyedot perhatian khalayak ramai, terutama masyarakat sekitar dan pemerintah setempat.

Basiru Isa dari Jaringan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal Untuk Pengelolaan Ekosistem Hutan yang Berkelanjutan di Afrika Tengah (REPALEAC) menyatakan perayaan HIMAS 2025 di Kasepuhan Guradog ini sangat penting baginya. Ia datang dari Kongo untuk ambil bagian dalam acara ini.

Oleh: Hairuddin Alexander
Jurnalis Masyarakat Adat
dari Kalimantan Timur

"Saya senang bisa ambil bagian dalam acara ini. Perayaan HIMAS 2025 ini merupakan satu upaya untuk mengekspresikan identitas dan bagaimana Masyarakat Adat menentukan nasib sendiri," kata Basiru Isa disela perayaan HIMAS 2025 di Kasepuhan Guradog pada Sabtu, 9 Agustus 2025.

Basiru Isa sangat mengagumi para peserta pawai budaya HIMAS 2025, terutama para perempuan adat yang menggunakan busana daerah masing-masing tampil cukup mempesona. Ia memahami bahwa semua ini adalah bagian dari upaya untuk menunjukkan identitas sebagai Masyarakat Adat yang telah memberi kontribusi melindungi dunia.

*Basiru Isa dari Jaringan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal Untuk Pengelolaan Ekosistem Hutan yang Berkelanjutan di Afrika Tengah (REPALEAC).
Sumber Foto:
Dokumentasi AMAN.*



Hal senada disampaikan oleh Juan Calos Jintiach dari Aliansi Global Komunitas Teritorial (GATC). Baginya, hadir dalam perayaan HIMAS 2025 yang dilaksanakan oleh AMAN merupakan suatu kegembiraan.

"Bagi saya, suatu kegembiraan berada di sini," akunya.

Menurut Juan Calos, perayaan HIMAS 2025 ini adalah hari istimewa. Kita harus mengingat perjalanan panjang untuk kebangkitan Masyarakat Adat, perjalanan panjang berjuang untuk Masyarakat Adat yang dirampas hak-haknya.

"Kita harus mengingat mereka. Jadi, (HIMAS 2025) ini adalah hari yang penting bagi semua orang di seluruh dunia," tegasnya.

Juan Calos mengatakan perayaan HIMAS 2025 ini patut diapresiasi karena bukan sekedar perayaan yang hanya menampilkan identitas Masyarakat Adat, tapi menjadi hari yang paling penting bagi generasi yang akan datang.

"Untuk Ibu Bumi, untuk semua hak," ujarnya.



Juan Calos Jintiach dari Aliansi Global Komunitas Teritorial (GATC).
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



Ribuan Masyarakat Adat dari berbagai daerah ikut meramaikan perayaan HIMAS 2025 di Kasepuhan Guradog, Kecamatan Curigbitung, Kabupaten Lebak, Banten pada Sabtu, 9 Agustus 2025.

Perayaan HIMAS 2025 diawali dengan pawai budaya dan penanaman pohon. Kemudian, dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi Asosiasi Jurnal Masyarakatan Adat Nusantara dan janji AMAN. Perayaan HIMAS 2025 yang mengusung tema : Memperkuat Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri: Jalan Menuju Kedaulatan Pangan, semakin meriah dengan adanya pameran kuliner, penampilan budaya, diskusi dan peluncuran buku.

Roeut Sochat dari Asosiasi Pemuda Adat Kamboja mengaku baru pertama ini menghadiri perayaan HIMAS di Indonesia. Pemuda yang juga mengikuti pertemuan Global Forum Masyarakat Adat Asia Tenggara 2025 di Bogor ini mengatakan HIMAS 2025 bukan sekedar perayaan tapi lebih dari sebuah bentuk solidaritas Masyarakat Adat.

"Di acara (HIMAS 2025), saya melihat solidaritas antar Masyarakat Adat disini jauh lebih baik dari negara saya, mungkin karena pengalaman atau latar belakang pendidikan jauh lebih baik," ungkapnya.

Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi, bersama peserta pawai budaya dalam perayaan HIMAS 2025, di Kasepuhan Guradog. Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



Masyarakat Adat Langagedha di Flores Masih Menjaga Tradisi Leluhur

Oleh: **Simon Welano**
Jurnalis Masyarakat Adat
dari Nusa Tenggara Timur



Masyarakat Adat Langagedha bergotong royong membangun rumah adat. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Rumah adat berbentuk joglo berdiri kokoh di kampung adat Langagedha. Tidak banyak kendaraan yang melintas di perkampungan ini karena jaraknya yang jauh sekira 8 km dari pusat kota Kabupaten Ngada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.

Kampung yang terletak di selatan Kota Bajawa ini masih menjaga tradisi dan merawat semua kekayaan warisan leluhur. Masuk ke perkampungan Langagedha ini serasa memasuki sebuah peradaban kuno yang berada di zaman modern.

Masyarakat Adat di perkampungan Langagedha sangat ramah dan miliki wilayah adat yang sangat luas mencakup tiga desa yakni Langagedha, Bomari dan Borani. Ketiga desa ini berada dalam wilayah adat Suku Keli, yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan peternak.

Kepala Suku Keli, Andreas Ruwe mengatakan semua tanah ulayat yang ada di wilayah adat sudah dikuasai oleh kepala suku sesuai dengan pembagian yang telah diwariskan oleh para leluhur. Karenanya, Masyarakat Adat tidak boleh melakukan aktivitas apa pun di atas tanah ulayat tanpa persetujuan dari kepala suku.

"Semua Masyarakat Adat diwajibkan untuk mentaati aturan adat yang ada, termasuk semua ritual adat yang dilakukan dalam satu tahun berjalan sesuai dengan kalender adat yang berlaku," kata Andreas pekan lalu.



Disebutkan, dalam kalender Masyarakat Adat Langagedha menganut 13 bulan dalam satu tahun. Ke-13 bulan tersebut adalah: *Reba* (Januari), *Loge Nguza* (Februari), *Loge Waja* (Maret), *Ipu W'te* (April), *Ipu T'ke* (Mei), *Ipu Manu* (Juni), *Ngede Doko* (Juli), *Fanga Ze'e* (Agustus), *Fanga Zi'a* (September), *Pana* (Oktober), *Lalo Are* (November), *Vo'wo* (Desember), *Bui* (Januari).

"Dari 13 bulan ini, ada bulan tertentu yang sakral untuk pelaksanaan ritual tahunan," ucapnya.

Ritual Tolak Bala

Ritual tolak bala merupakan salah satu ritual adat yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Langagedha dalam menghadapi serangan penyakit, baik penyakit tanaman, hewan maupun penyakit yang mengancam kehidupan manusia. Dalam satu dekade terakhir, ancaman bahaya berbagai penyakit yang datang menyerang komunitas Masyarakat Adat Langagedha hampir tidak pernah terjadi. Namun ada beberapa perubahan iklim yang mempengaruhi kehidupan Masyarakat Adat dan alam sekitarnya.

Situs Sakral Masyarakat Adat Langagedha.
Sumber foto: budayalangagedha.com.



Menurut Fransiskus Wogha, sesepuh dan tokoh adat Langagedha, dalam 10 tahun terakhir tidak ada perubahan iklim yang berarti di dalam kehidupan Masyarakat Adat Langagedha. Namun perubahan iklim yang bersifat umum akibat dari Badai Seroja, wabah Covid-19 atau hama tanaman yang pernah menyerang petani kopi maupun petani sayur pernah terjadi.

"Kalau 10 tahun terakhir, perubahan iklim itu tidak ada. Kejadian yang diakibatkan oleh alam hanya terjadi pada tahun 1972. Itu karena hujan lebat sampai beberapa hari sehingga terjadi banjir," terangnya.

Fransiskus menambahkan pada tahun 1969 juga terjadi gempa bumi akibat meletusnya Gunung Iya di Ende. Kemudian di 1992 terjadi lagi gempa bumi di seluruh Flores yang memakan korban cukup banyak.

Fransiskus mengatakan selain gempa bumi, tanaman milik Masyarakat Adat pernah diserang hama pada tahun 2018.

"Tanaman dadap yang menjadi pelindung kopi diserang hama jenis ulat yang mengakibatkan matinya dadap tersebut," ujarnya.

Fransiskus melanjutkan saat ini pohon pelindung kopi atau dadap itu sudah tidak ada lagi di Langa. Para petani kopi telah menggantikan jenis tanaman pelindung kopi tersebut dengan menanam pohon sengan.

Tak hanya kopi yang diserang hama, sayuran juga. Akibatnya, tanaman sayur milik Masyarakat Adat Langagedha tidak berproduksi dengan baik.

"Para petani sayur mengalami gagal panen karena tanaman sayurnya diserang hama kutu yang membuat daun sayur kerdil dan membusuk. Hasil produksi sayur menurun dan petani mengalami kerugian besar saat itu," tutur Wogha.



Masyarakat Adat sedang mengikuti ritual adat Reba di Langagedha.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Untuk bisa menghentikan serangan hama dan penyakit tanaman ini, sebut Fransiskus, para petani melakukan ritual tolak bala. Mereka membuat sebuah perahu kecil, lalu didorong ke laut mengikuti aliran sungai untuk mengusir hama dan penyakit tanaman tersebut. Atau, bisa juga perahu kecil tadi dilarung ke dalam sebuah kolam sungai yang besar lalu dilempar dengan menggunakan tongkol jagung untuk larut bersama aliran sungai.

“Mendorong perahu kecil untuk larut bersama aliran sungai ini menunjukkan bahwa semua hama penyakit tanaman telah diusir pergi bersama perahu yang membawanya hingga ke laut lepas dan tidak boleh datang kembali di kebun para petani yang ada di Langagedha,” jelas Wogha.

Pesta Adat *Reba*

Bagi Masyarakat Adat Langagedha, bulan Desember hingga Februari merupakan bulan yang sakral. Sebab, pelaksanaan ritual adat *Reba* akan dimulai dari bulan Desember dan berakhir pada puncaknya di Januari. Sedangkan pada bulan Februari, biasanya dilaksanakan tahapan akhir sebagai penutup dari semua pelaksanaan ritual *Reba*.

Seluruh Masyarakat Adat Langagedha, termasuk yang tinggal jauh di perantauan sudah mengetahui tentang pelaksanaan pesta adat *Reba* ini. Pada bulan yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan pesta adat *Reba*, Masyarakat Adat telah mempersiapkan diri untuk turut hadir dalam pelaksanaan pesta adat tahunan tersebut.

Masyarakat Adat Langagedha bernyayi bersama.
Sumber foto: budayalangagedha.com.



Arnold Seragera selaku pemerhati adat dan budaya Langagedha, menerangkan pesta adat *Reba* dilaksanakan sebagai bentuk ucapan syukur Masyarakat Adat kepada Sang Pencipta Semesta Raya dan alam raya beserta isinya. Bentuk ucapan syukur itu diwujudkan dalam keharmonisan, keseimbangan, keselarasan dan kedamaian dalam hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan alam dan Leluhur, serta manusia dengan manusia yang ada di sekitarnya.

Arnold mengungkapkan didalam pelaksanaan pesta adat *Reba*; orang-orang akan melakukan silahtuhami, kunjung mengunjungi keluarga dan kerabat maupun kenalan sambil menikmati semua hidangan makanan yang telah disajikan. Setiap orang yang datang mengikuti pesta adat ini, dapat berkunjung dari rumah ke rumah dan diwajibkan untuk menyantap makanan dan minuman yang telah disiapkan oleh tuan rumah sebagai simbol kebersamaan, pengucapan syukur atas panen yang dihasilkan dari tanah warisan leluhur. Selain itu, sebagai wujud penghargaan terhadap makanan dan minuman yang telah disiapkan dan penghormatan

terhadap Sang Pencipta, Alam dan Leluhur yang telah memberikan kelimpahan hasil panen dalam waktu setahun.

"Pesta Adat *Reba* memiliki kekuatan yang besar untuk menggerakkan hati setiap orang Bajawa maupun Langagedha untuk mengingatkan kembali kampung halamannya. Orang-orang Bajawa yang jauh dari kampung halamannya atau di perantauan dapat pulang ke kampung halamannya untuk secara bersama-sama merayakan pesta adat ini," tuturnya.

Arnold mengatakan pesta *Reba* merupakan momentum adat yang diselenggarakan setahun sekali sehingga anggota Masyarakat Adat yang berada di tanah rantau pun akan segera pulang untuk merayakan kebersamaan ini sebagai tanda kecintaan seseorang terhadap kampung halamannya.

"Karena kecintaan kita terhadap kampung halaman, maka dengan sendirinya nurani kita tergerak untuk segera kembali ke kampung agar bisa berkumpul bersama merayakan pesta adat *Reba* ini," tutupnya.



Situs sakral milik Masyarakat Adat Langagedha.
Sumber foto: budayalangagedha.com.



Adu Inum, Perempuan yang Meramu dan Merawat Kehidupan

Oleh: **Sri T. Shuket**
PHD Perempuan AMAN Sekatak,
Kalimantan Utara

Adu Inum, perempuan adat berusia 67 tahun, dikenal karena kebijaksanaan dan pengalamannya dalam meramu obat-obatan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan. Ia menjadi sosok yang dipercaya di lingkungannya. Kegiatan sehari-harinya di ladang dan kebun meneguhkan pengetahuannya tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kesehatan.

Adu Inum belajar pengobatan dari kakak iparnya, Adu Laya (alm.), serta dari ajaran leluhur yang diwariskan turun-temurun. Sejak muda, ia sering diajak ke hutan, ladang, dan kebun untuk mengenal berbagai jenis tanaman obat. Hingga kini, rutinitasnya tetap diisi dengan kesibukan merawat tanaman, memanen, mengeringkan, dan mengolah tanaman obat yang sudah dipetik, serta menyediakan stok obat di rumah.

Pengetahuan Adu Inum tentang obat herbal sangat luas. Ia sering menggunakan *ino* (puli nesom) dan *ketimang* untuk mengobati berbagai penyakit. *Ino*, misalnya, digunakan sebagai obat anak-anak ketika muntaber. Cara mengolahnya bisa dibakar hingga menjadi arang, lalu ditumbuk halus, diseduh, dan diminum, atau dioleskan ke perut dan leher. Bisa juga dengan menyeduh kulit batang yang dikikis menggunakan air panas. *Ketimang* digunakan untuk penyakit dalam maupun luar; batangnya direbus untuk sakit pinggang, mengeringkan peranakan ibu yang masih dalam masa nifas, sekaligus menjadi kontrasepsi alami, sedangkan kulitnya ditumbuk halus untuk ditempelkan pada luka.

Adu Inum yang berbaju ungu berfoto bersama PHD Perempuan AMAN Sekatak, Kaltara.
Sumber Foto: Dokumentasi PHD Perempuan AMAN Sekatak, Kaltara.





Dalam lingkup keluarga, pengetahuan Adu Inum tentang obat herbal masih terus dipraktikkan. Setiap kali ada anggota keluarga sakit, pengetahuannya selalu menjadi penolong utama. Masyarakat pun melihatnya sebagai tabib yang ilmunya tidak diragukan lagi.

Bagi Adu Inum, hubungan manusia, alam, dan kesehatan adalah satu kesatuan yang erat dan saling memengaruhi. Pengetahuannya tentang pengobatan tidak terlepas dari kepercayaan dan kisah-kisah leluhur tentang tanaman obat. Ia percaya, pengambilan tanaman obat tidak boleh berlebihan agar ekosistem tetap terjaga.

Peran Adu Inum tidak terbatas hanya pada keluarga dan komunitas. Ia pernah juga menjadi narasumber dalam kegiatan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) yang mendokumentasikan obat herbal. Dengan senang hati, ia membagikan pengalaman kepada masyarakat luas, mengingatkan anak muda akan pentingnya menjaga pengetahuan dan melestarikan tanaman obat. Masyarakat dari luar komunitas sangat menghargai kesabaran dan ketulusannya dalam mengajar. Adu Inum tidak hanya berbagi nama tanaman, fungsi, dan cara penggunaannya, tetapi juga memastikan para murid dapat memahami dan menerapkannya.

Reputasinya sebagai sumber pengetahuan terpercaya telah tersebar luas. Ia menjadi guru dan pakar dalam bidang obat herbal—bimbingan berharga bagi anak cucunya, mahasiswa, dan banyak orang di luar komunitas. Pengetahuan yang diwariskan leluhur ini bukan hanya menjaga kesehatan individu, tetapi juga melestarikan tradisi herbal untuk generasi mendatang.

Apa yang ditekuni Adu Inum hari ini tidak berdiri sendiri. Dalam sejarah yang lebih luas, pengetahuan perempuan penyembuh di berbagai belahan dunia sering kali menghadapi tekanan dan penyingkiran. Pada masa awal kapitalisme di Eropa, misalnya, banyak perempuan yang memiliki pengetahuan tentang ramuan dan penyembuhan justru diburu dan dianggap berbahaya. Sejarawan Silvia Federici dalam bukunya *Caliban and the Witch* (2004) menulis bahwa perburuan terhadap perempuan penyembuh kala itu menjadi cara negara dan gereja menguasai tubuh perempuan sekaligus menghapus pengetahuan yang memberi mereka kemandirian. Dari situlah sistem medis modern tumbuh—dengan menyingkirkan perempuan dari praktik penyembuhan.

Adu Inum yang berbaju ungu menjelaskan beberapa kegunaan tanaman obat yang ada di hutan pada anggota Perempuan AMAN Sekatak, Kaltara.

Sumber Foto: Dokumentasi PHD Perempuan AMAN Sekatak, Kaltara..





Refleksi ini terasa relevan hari ini, ketika negara menolak *judicial review* UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE). Penolakan itu menunjukkan bahwa negara selalu memisahkan pengetahuan dan praktik Masyarakat Adat dari pengelolaan sumber daya alam. Padahal, pengetahuan seperti yang dijaga Adu Inum membuktikan bahwa kesehatan, tubuh, dan kelestarian lingkungan tidak bisa dipisahkan.

Meski menghadapi tantangan besar—perubahan lingkungan, hilangnya beberapa tanaman, dan berkurangnya minat generasi muda—Adu Inum tetap percaya bahwa cara terbaik menjaga tradisi adalah dengan terus mengajarkannya kepada anak muda, serta terus menanam dan merawat tanaman obat di hutan, ladang, dan kebun.

Adu Inum adalah contoh nyata perempuan adat yang peduli bukan hanya pada kesehatan dan kesejahteraan, tetapi juga pada pelestarian budaya dan lingkungan. Sosoknya menginspirasi generasi muda untuk menjaga wilayah adat, merawat alam, dan memastikan pengetahuan tetap hidup dan berkembang, meski arus sejarah, politik, dan kebijakan sering bergerak ke arah sebaliknya.



Ketimbang, salah satu tanaman obat yang biasa digunakan oleh Masyarakat adat di Sekatak, Kaltara.

Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



SEMESTA PENGETAHUAN MASYARAKAT ADAT

JALAN ADIL — HADAPI — KRISIS IKLIM

Oleh: Tim Infokom PB AMAN

Di Kampung Puntana, Sulawesi Tengah, Masyarakat Adat Nggolo masih teguh mempraktikkan tradisi menanam padi ladang atau Punde. Bagi mereka, Punde bukan sekadar tanaman pangan, tetapi sebuah ritual untuk menjaga hubungan dengan leluhur, alam semesta, dan Sang Pencipta.

Dari membuka lahan (Nantalu) hingga panen (Nokato), setiap tahapannya penuh makna dan diiringi ritual seperti Nolopi dan Balia (nyanyian syukur semalam suntuk). Padi ladang juga menjadi cadangan pangan strategis yang dikonsumsi saat ada tamu penting atau situasi sulit.

Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.





Bisok Menik adalah Ritual Cuci Beras yang dilakukan Masyarakat Adat Bayan dalam upacara Maulid Adat. Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.





Turun nyambut adalah upacara adat yang dilakukan di Kasepuhan Gelar Alam sebagai penanda dimulainya kembali aktivitas pertanian, yaitu persiapan untuk membajak sawah dan menanam kembali setelah upacara Seren Taun selesai. Prosesi ini merupakan bentuk rasa syukur dan sukuran akan dimulainya musim pertanian yang baru.

Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.





Setiap Helai Benangnya adalah Doa dan Pengingat. Lebih dari sekadar kain, Tenun Pringgasela adalah naskah kehidupan bagi Masyarakat Adat Sasak di Lombok. Setiap motifnya mengandung filosofi mendalam tentang tiga aspek utama: Lahir, Hidup, dan Mati.

Dari Sabok Beranak untuk menyambut kelahiran, Bidadari Ngamok yang membimbing anak perempuan, hingga Reragian Lelangit yang sakral untuk prosesi kematian. Tenun ini adalah penanda setiap tahapan hidup manusia, ditenun dengan penuh doa dan harapan.

Yang lebih mengagumkan, tradisi ini dijaga dengan melibatkan anak-anak sejak dini, menggunakan alat tenun mini dari daun kelapa. Sebuah warisan budaya yang tak ternilai yang terus hidup dari generasi ke generasi.

Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.





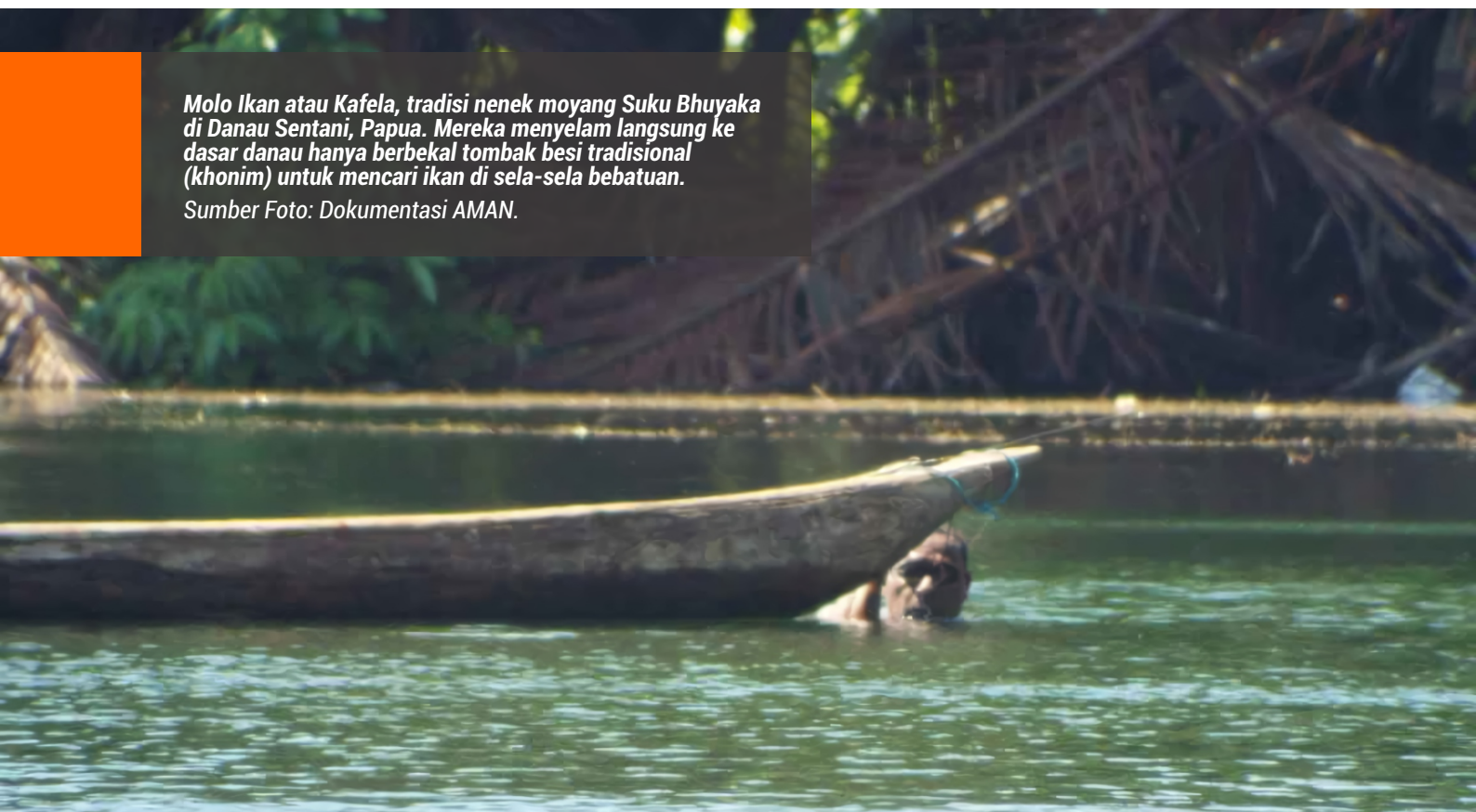
Peserta didik Sekolah Adat Punan Semeriot antusias mencatat materi yang diberikan oleh pengajar
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



Sekolah Adat Pusu Sapu belajar alat musik tradisional Sumbawa.
Sumber Foto: Sekolah Adat Pusu Sapu.



**Masyarakat Adat Dangiing
Batuwangi, Garut, menderes nira
Aren untuk dijadikan Gula Aren.**
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



**Molo Ikan atau Kafela, tradisi nenek moyang Suku Bhuyaka
di Danau Sentani, Papua. Mereka menyelam langsung ke
dasar danau hanya berbekal tombak besi tradisional
(khonim) untuk mencari ikan di sela-sela bebatuan.**
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



Masyarakat Adat Lamtoras Sihaporas
rehabilitasi wilayah adat.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



Rangkaian dan Prosesi Ritual dan Musyawarah Adat
Masyarakat Adat Sepegunungan Seram Utara.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



*Kaki buaya seharga Rp. 40.000 di Pasar Digul.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.*





**Anak Adat
di Sungai Utik
mempersiapkan
jerat hewan buruan.
Sumber Foto:
Dokumentasi AMAN.**



**Masyarakat Adat
di Namblong, Jayapura,
Papua memanen sayur.
Sumber Foto:
Dokumentasi AMAN.**





Anak Adat belajar memainkan Angklung Paglak untuk mengusir hama burung di sawah.

Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



Anak Adat di Toraja belajar membuat manik-manik.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.



Anak-Anak Adat mengikuti orang tuanya menjala ikan merupakan bentuk transfer pengetahuan dalam bertahan hidup Masyarakat Adat Aru.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.





Anak beserta Ayah menunggu Ibu pulang memancing di Kali Digul, Papua Selatan.

Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.





*Perempuan Adat menganyam atap untuk perbaikan Sekolah Adat Pesinauan, Kemiren, Banyuwangi, Jawa Timur.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.*



LAPORAN KEUANGAN
ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA
 per 30 September 2025

Sumber Dana	Jumlah
Donor	
The Tenure Facility	236.507.700,02
NICFI	100.969.172,00
SKOLL Award	2.219.581.435,45
OSF - AMAN	150.000.000,00
CLUA - FPCI	14.826.905.226,00
CLUA - Michigan	-
Thousand Currents	2.571.972.692,44
NDI	241.373.778,71
Pawanka Wayfinders	290.117.536,00
The Christensen Fund	3.485.169.854,00
Packard	3.183.104.413,00
Wikimedia	1.409.690.170,00
Saldo	28.715.391.977,62
Dana iuran dan Sumbangan-sumbangan	
Dana iuran kader dan komunitas Anggota AMAN	278.763.532,57
Donasi (Penggalangan Dana Mandiri)	105.096.312,34
Dana Organisasi	
Kas	10.000.000,00
KMAN VII	550.000.000,00
Dana Organisasi	5.118.508.327,26
Dana Resiliency	5.068.156.960,00
Dana Tanggap Darurat	4.528.023.222,06


**LAPORAN
KEUANGAN
TANGGAP
DARURAT/
EMERGENCY
RESPOND
(ER) AMAN**

Saldo menurut bank Per 31 Desember 2019		504.184.783,76
Penerimaan		
20 April 2020	Tamalpais Trust Fund	764.770.500,00
4 Mei 2020	Pawanka Foundation	439.280.250,00
23 Juni 2020	Tebtebba Foundation (ER)	209.040.750,00
10 Juli 2020	AVAAZ Foundation	1.061.037.750,00
18 September 2020	Rainforest Foundation US (ER)	712.892.376,00
27 Oktober 2020	IFAD	33.960.000,00
16 Desember 2020	Ashden Trust	101.953.500,00
24 Februari 2021	Pawanka Foundation - Wayfinder	8.716.875,00
12 April 2021	CLUA	68.122.729,00
27 Juli 2021	SAMDHANA	43.500.000,00
13 Agustus 2021	Tamalpais Trust Fund	706.834.950,00
25 Agustus 2021	Ashden Trust	773.560.000,00
10 September 2021	CLUA	52.968.750,00
22 Oktober 2021	Pawanka Foundation	694.346.700,00
8 November 2021	Packard	5.659.759.450,00
29 Juni 2022	Skoll	171.250.000,00
5 Juli 2022	Pawanka Wayfinder	17.733.315,00
17 Oktober 2022	Pawanka Wayfinder	756.250.000,00
14 Desember 2022	Tenure Facility	498.244.499,00
14 Maret 2023	Skoll	866.000.000,00
14 Maret 2023	Ballmer	2.238.445.800,00
20 September 2023	Wikimedia	73.994.450,00
6 Desember 2023	Tenure Facility	516.069.260,00
31 Januari 2024	Clarifi	150.000.000,00
3 April 2024	Silicon Valley	29.777.000,00
29 April 2024	Nia Tero	18.750.000,00
13 September 2024	Matata	3.000.000,00
19 Oktober 2024	Tenure Facility	582.687.360,00
13 September 2024	Pawanka	19.250.000,00
13 Januari 2025	NDI	61.625.000,00
6 Juni 2025	Niaterro	3.999.439,00
Total Dana ER AMAN		17.842.005.486,76
Pengeluaran per 30 Juni'25		13.110.385.744,74
Sisa dana menurut bank Per 30 Juni 2025		4.731.619.742,02
Biaya-biaya berupa Pembelian APD, logistik, barter, konsumsi staf, Kader, relawan, Unit Tanggap Darurat (UTD) AMAN, pembuatan masker, pembuatan handsanitizer, Disinfektan, tempat cuci tangan, publikasi, komunikasi, dan kedaulatan pangan dll terkait penanggulangan COVID19 dan Dukungan-dukkungan Tanggap darurat Bencana alam, dan lain-lain		



LAPORAN IURAN KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT ANGGOTA AMAN

Juli - September 2025

Nama Komunitas	Iuran Komunitas
Kambera	85000
Lewa Paku	76000
Palumarung	86000
Mahu Karera	100000
Praingu Prai Liu	56000
Parengu Napu	60000
Pataning Wua Kamba Rindi	60000
Umalulu (Paraing Umalulu)	119000
Kabihu Matolang	98000
Praingu Lai Taku	240000
Parengu Wundut - Tangga Madiata	60000
Parengu Tagedu	60000
Paser Mayang	120000
Tumbang Masukih	120000
Tehang	120000
Bulu lewang	120000
Karaeng Bulu	120000
Karaeng Buru	120000
Tanralili	120000
Batu Bassi	120000
Karaeng Bossolo	120000
Bassikalling	120000
Goiso Oinan	600000
<i>Total</i>	2.900.000



LAPORAN IURAN KADER MASYARAKAT ADAT ANGGOTA AMAN

Juli - September 2025

Nama Kader	Iuran Kader
Paulus Alfon Yance	24000
Arni	48000
Fadly	48000
Arbani	48000
Asmuni	48000
Isna	24000
Arnisyah	24000
Rosa Pegi Alvisa	24000
Andi Lala	30000
Total	318.000



*Masyarakat Adat Osing sedang melakukan Mocoan Lontar (merapal kitab kuno) di Sekolah Adat Pesinauan, Osing Banyuwangi, Jawa Timur.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN.*

**LAPORAN DANA BADAN USAHA MILIK ORGANISASI,
KELOMPOK USAHA MASYARAKAT ADAT &
BADAN USAHA MILIK MASYARAKAT ADAT**

Juli - September 2025

Keterangan	Jumlah
Sharing Profit Penggunaan VIP Room (Bumi Nusantara)	2.486.175
Sharing Profit Penggunaan VIP Room (Bumi Nusantara)	1.039.650
Total	3.525.825





SAHKAN RUU MASYARAKAT ADAT SEKARANG JUGA

UU MASYARAKAT ADAT ADALAH MANDAT KONSTITUSI
UNTUK MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT ADAT



Bumi Nusantara.

Bumi Nusantara.

Bumi Nusantara adalah communal space yang bisa kamu gunakan untuk berbagai macam keperluan kamu.

Fasilitas Bumi Nusantara

- * TV LCD 75 inch
- * FREE Wi - Fi
- * Sound System
- * Papan tulis
- * AC dan interior cozy
- * Private seating area

Ruang luas, fasilitas lengkap, cocok untuk segala acara.



Instagram
@genuscoffeeboutique

Info & Reservasi
0811-1110-0427

Jl. Raya Cifor No. 8,
Situ Gede, Kota Bogor

VIP

Room Sumba

Gerai
Nusantara



Kenapa namanya **VIP Room Sumba?**

Vip dengan desain tematik dan kain sumba yang menjadi focal point utamanya

Siapa adakan, meeting, arisan atau bridal shower yang lebih berkesan?

Fasilitas VIP Room Sumba

- * TV LCD 50 inch
- * FREE Wi - Fi
- * Sound System
- * Papan tulis
- * AC dan interior cozy
- * Private seating area


GENUS
COFFEE & BOUTIQUE

 Instagram
@genuscoffeeboutique

 Info & Reservasi
0811-1110-0427

 Jl. Raya Cifor No. 8,
Situ Gede, Kota Bogor

TENUN BIMA

Warisan Budaya Nusantara

Sarung Nggoli Rp. 400.000,-/Lembar
Sarung Salungka Rp. 550.000,-/Lembar
Sarung Renda Rp. 750.000,-/Lembar
Sarung Galendo Rp. 800.000,-/Lembar
Sambolo (Ikat Kepala) Rp. 230.000,-/Lembar
Syal Tenun Bima Rp. 230.000,-/Lembar

Tenun Bima adalah warisan budaya yang ditenun dengan kesabaran, menyimpan makna filosofis dari setiap motif dan warnanya. Dibuat secara manual oleh tangan-tangan terampil para penenun perempuan adat di tanah Bima, setiap helai benang dalam kain ini mencerminkan kearifan lokal, keindahan alam, serta nilai-nilai adat istiadat yang luhur.

Dengan teknik tenun tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun, Tenun Bima hadir dalam berbagai motif khas seperti Wura Bunga dan Nggoli yang masing-masing memiliki cerita dan simbol tersendiri. Tenun Bima tidak hanya sekadar kain, tetapi juga simbol identitas, kebanggaan, dan elegansi bagi siapa pun yang mengenakannya.

Kini, Tenun Bima dikembangkan dalam bentuk produk fashion modern dan busana adat elegan, yang memadukan sentuhan tradisi dan gaya masa kini. Cocok dikenakan dalam acara resmi, pernikahan, ataupun dipadukan untuk tampilan sehari-hari yang berkelas.



BUMMA SAGELE WAWO

Kontak Pemesanan: +62 853 3919 6262



Rp. 160.000,-



500 ml

Madu Hutan Tambora

Madu Hutan Tambora, dihasilkan lebah liar yang mengumpulkan nektar bunga-bunga asli di kawasan Hutan Sanggar dan pegunungan Tambora, Nusa Tenggara Barat. Madu ini memiliki cita rasa khas yang autentik, kaya akan aroma bunga hutan dan memiliki kandungan nutrisi yang lengkap, berkat keanekaragaman flora yang tumbuh subur di habitat aslinya.

Dipanen secara tradisional oleh masyarakat lokal, Madu Hutan Tambora memastikan kemurnian produk tanpa tambahan bahan kimia atau pemanis buatan. Kandungan antioksidan alami dan berbagai enzim dalam madu ini dipercaya memberikan manfaat kesehatan, seperti meningkatkan daya tahan tubuh, membantu proses penyembuhan luka, serta menjaga kesehatan pencernaan.

Warna cokelat keemasan dan kental, Madu Hutan Tambora bukan hanya nikmat sebagai pemanis alami dalam makanan dan minuman, tetapi juga merupakan pilihan tepat bagi Anda yang mengutamakan produk organik dan berkelanjutan dari alam Indonesia.

BUMMA SANGGAR MANDIRI

Kontak Pemesanan: +62 823 3913 1089

WILAYAH ADAT ADALAH BENTENG KESELAMATAN BUMI DARI KRISIS IKLIM YANG MELANDA

Nusantara kita terdiri dari bermacam-macam suku yang tersebar di ribuan pulau, disana terdapat ribuan Komunitas Masyarakat Adat yang hidup dan menjaga Wilayah Adat sebagai ruang hidup. Masyarakat Adat masih menjalankan tradisi dan budaya yang telah diwariskan bergenerasi-generasi lamanya, secara lestari tanpa merusak bumi, planet kita satu-satunya, rumah kita semua.

Masyarakat Adat telah berperan penting dalam menjaga lestarnya bumi selama bermilenia lamanya, menjaga bumi terhindar dari berbagai bencana ekologi, terlebih saat bumi kita saat ini berada dalam krisis iklim parah akibat keserakahan korporasi & negara.

Wilayah adat bukan hanya ruang hidup bagi Masyarakat Adat tapi juga sebagai benteng pengaman keselamatan kehidupan di planet ini dari marabahaya yang timbul akibat krisis iklim yang melanda. Selain itu wilayah adat juga adalah penghasil bahan pangan, obat-obatan, oksigen bagi kita semua, sekaligus rumah bagi ribuan spesies flora & fauna yang terancam punah.

Kita bisa memulai langkah kecil dengan mendukung Masyarakat Adat untuk terus melestarikan wilayah adatnya, baik itu hutan, bukit, gunung, sungai, hingga lautannya, agar krisis iklim yang kini melanda dapat kita lawan bersama.

Jadilah DerMA (Dermawan Masyarakat Adat) dengan berdonasi melalui :

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA
Bank MANDIRI KCP PEJATEN, JAKARTA
Nomor Rekening : 127 - 000 - 657 - 090 - 5

Terimakasih telah bersedia berdonasi dan mendukung Masyarakat Adat merawat dan menjaga wilayah adatnya, karena keselamatan Bumi ada ditangan kita semua.

